



LAPORAN TRIWULAN 1 TAHUN 2021

**BALAI BESAR POM
DI JAKARTA**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja pada tahun 2021 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2021 Triwulan I. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2021, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja target triwulan I tahun 2021 evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 20 April 2021



Drs. Safriansyah, Apt, M.Kes

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 Triwulan I merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2020-2024 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2021. Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024, untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021, telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
8. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal;
9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal;
10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan; dan
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel.

Pencapaian sasaran strategis tahun 2021 diukur terhadap 28 indikator kinerja utama yang akan dicapai. Pada Triwulan I tahun 2021, dari 11 sasaran strategis yang ditetapkan, dengan 28 indikator. Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 3 (tiga) indikator mencapai target dengan kriteria “**sangat baik**” ($110\% < x \leq 120\%$); 17 (tujuh belas) indikator mencapai target dengan kategori “**baik**” ($90\% \leq x < 110\%$); 3 (tiga) indikator mencapai kategori “**cukup**” ($70\% \leq x < 90\%$); 6 (enam) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”. Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Pada Triwulan I tahun 2021 semua sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta belum dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya. Tiga (3) sasaran strategis lainnya dengan capaian indikator kinerja “**baik**” ($90 \leq x < 110$) yang meliputi sasaran strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian rata-rata 103,17%, “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian rata-rata 103,84%, dan “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 107,37%.

Tiga (3) sasaran strategis mempunyai capaian indikator kinerja dengan kriteria “**cukup**” ($70 \leq x < 90$) diantaranya adalah sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian 75, “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 75,46, dan “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel” dengan capaian sebesar 75%. Untuk sasaran

strategis lainnya belum dapat dihitung dikarenakan merupakan indeks dan bisa dihitung pada akhir tahun 2021.

Berdasarkan analisis efisiensi kegiatan maka seluruh kegiatan di Balai Besar POM di Jakarta sebagian besar efisien dengan Tingkat Efisiensi (TE) berkisar antara 0,28 hingga 38,06. Kegiatan yang mempunyai nilai TE 38,06 adalah Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Sebagian besar kegiatan memiliki nilai TE dengan kategori efisien karena sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan dan sejalan dengan penyerapan anggaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 47.430.798.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan pada Triwulan I tahun 2021 sebesar Rp 3.007.551.160,- (tiga milyar tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah), dengan persentase serapan anggaran sebesar 6,34%.

Balai Besar POM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), Pasar aman dari bahan berbahaya, Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi).
2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.

3. Dengan telah diraihanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Tahun 2020, BBPOM di Jakarta memperkuat implementasi RB melalui berbagai kegiatan internalisasi kepada pegawai. Demi mendukung terwujudnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fokus kegiatan pada 2021 adalah peningkatan pelayanan publik melalui berbagai inovasi.

HIGHLIGHT KINERJA TRIWULAN I **TAHUN 2021**

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan **kegiatan terobosan (*breakthrough*)** di Triwulan I tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Memberikan Dukungan Penuh Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Terpadu Tahun 2021

Mengawali pelaksanaan Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Tahun 2021, Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Drs. Safriansyah, Apt., M.Kes beserta Tim melakukan

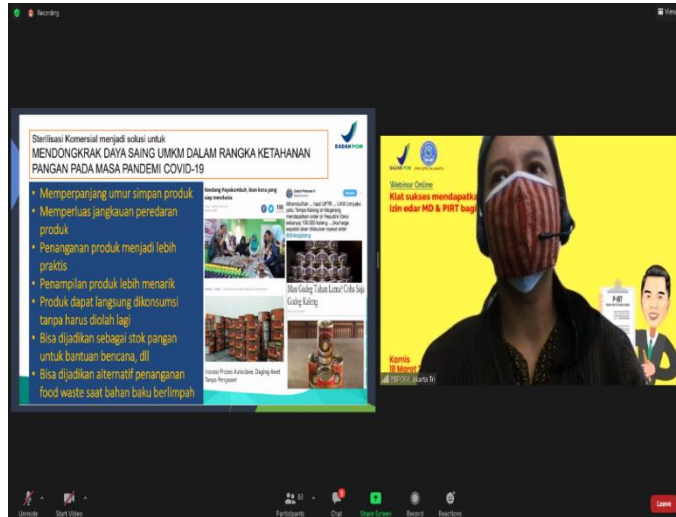
Audiensi ke
Pemerintah Kota
Administrasi
Jakarta Pusat
pada Selasa, 23
Maret 2021.
Pertemuan yang
dipimpin langsung



oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhany Sukma, S.Sos, M.AP, dihadiri juga oleh Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Perekonomian serta OPD terkait Keamanan Pangan meliputi Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) dan Suku Dinas Pendidikan. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat menyambut baik program prioritas keamanan pangan dan memberikan arahan kepada OPD terkait untuk saling bersinergi dan berkoordinasi dengan baik demi kelancaran pelaksanaan program keamanan pangan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Disampaikan juga lokasi target 9 kelurahan, 65 sekolah, dan 1 pasar tradisional yang akan menjadi lokus intervensi Program Keamanan Terpadu Tahun 2021.

2. Kolaborasi Balai Besar POM di Jakarta dengan KOPITU

Peningkatan layanan publik menjadi perhatian utama Balai Besar POM di Jakarta secara terus menerus. Salah satu pelayanan publik yang ditingkatkan adalah dukungan Balai Besar POM di Jakarta terhadap pengembangan dan daya saing UMKM khususnya di bidang Pangan Olahan, diantaranya adalah dengan melakukan kolaborasi pelayanan publik melalui fasilitasi UMKM dengan organisasi KOPITU (Komite Pengusaha Mikro Kecil Indonesia Bersatu). Bentuk kolaborasi dengan KOPITU dengan melakukan bimbingan teknis secara berkala kepada pelaku usaha UMKM dan fasilitasi uji laboratorium.



Tahap pertama Balai Besar POM di Jakarta memberikan Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha UMKM di Bidang Pangan yang berjumlah 90 (sembilan puluh) UMKM pada tanggal 18 Maret 2021 melalui media daring dengan peserta UMKM yang merupakan anggota KOPITU. Materi yang disampaikan tentang izin edar Pangan Olahan dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa di situasi pandemik sekalipun Balai Besar POM di Jakarta terus berkomitmen untuk mengedukasi dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya hal ini akan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi di saat pandemik seperti ini.

3. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan Komisi IX DPR RI melaksanakan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan. Kegiatan ini

dilaksanakan sebanyak 4 (empat) titik selama Triwulan I Tahun 2021, yaitu



pada 23 Februari, 26 Februari, 23 Maret, dan 31 Maret dengan tetap mengikuti Protokol Kesehatan. Total jumlah peserta dari kegiatan KIE ini yaitu 1500 orang berasal dari beberapa komunitas masyarakat seperti komunitas Ibu PKK dan Karang Taruna. Materi penyuluhan Obat dan Makanan disampaikan

oleh narasumber Balai Besar POM di Jakarta, anggota DPR RI Komisi IX, Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si., serta Suku Dinas Kesehatan Tingkat Kota Administrasi DKI Jakarta. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya dalam memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.

4. Puluhan Ribu Masker Kecantikan Ilegal Disita Balai Besar POM di Jakarta

Penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta melakukan penindakan terhadap ruko yang memproduksi kosmetik tanpa izin edar berupa masker kecantikan di Jakarta Timur, Senin, 8 Maret 2021. Sebanyak lebih dari 57.000 pcs masker disita dalam bentuk kemasan siap edar dan dalam bentuk paket siap kirim. PPNS juga menyita racikan bahan masker yang siap kemas beserta alat produksinya. Kosmetik tanpa izin edar/TIE tersebut dijual melalui situs *e-commerce* dan juga melalui akun sosial media. Produk kosmetik ilegal senilai 1,5 miliar rupiah tersebut selanjutnya disita sebagai barang bukti dan akan dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penjualan kosmetik racikan tersebut tidak sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku.



5. Balai Besar POM di Jakarta Sita Ribuan Kosmetik Ilegal Online di Wilayah Jakarta Pusat

Penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta melakukan penindakan terhadap ruko penjual kosmetik tanpa izin edar di Jakarta Pusat, Jumat, 26 Februari 2021. Sebanyak 6.000 pcs kosmetik ilegal berbagai merk berhasil disita oleh Penyidik dan Korwas PPNS Polda Metro Jaya. Kosmetik tanpa izin edar / TIE tersebut dijual melalui situs e-



commerce dan juga melalui akun sosial media. Produk kosmetik ilegal senilai lebih dari 400 juta rupiah tersebut selanjutnya disita oleh penyidik sebagai barang bukti dan akan dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penjualan kosmetik TIE melanggar pasal 197 jo pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

6. BBPOM di Jakarta Laksanakan Desk CAPA (Corrective Action-Preventive Action) Sebagai Upaya Dukungan Bagi Pelaku Usaha

Percepatan pelayanan publik terus menerus dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta. Desk CAPA adalah salah satu kegiatan yang rutin



dilakukan dalam membantu pelaku usaha menindaklanjuti audit dalam rangka sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), penerbitan rekomendasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

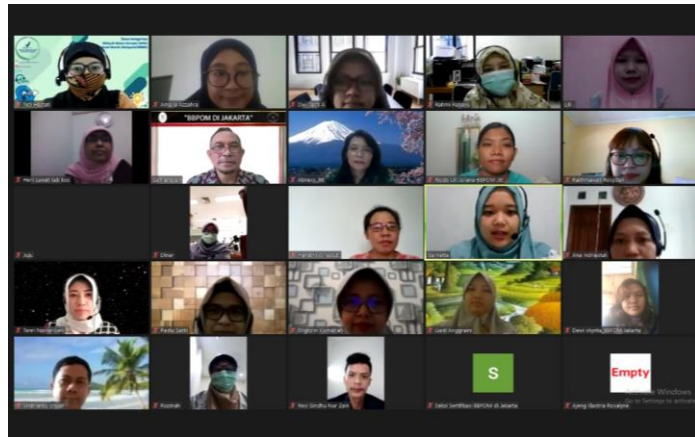
(CPPOB), rekomendasi Cara Distribusi Pangan Olahan yang Baik, Cara Distribusi Kosmetik yang Baik, rekomendasi penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik, rekomendasi penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik. Bertujuan agar pelaku usaha segera mendapatkan rekomendasi yang mereka butuhkan guna proses selanjutnya mendaftarkan produk ke Badan POM. Desk CAPA triwulan pertama di

tahun 2021 ini dilangsungkan pada tanggal 9 Februari 2021, dan mengundang 28 (dua puluh delapan) pelaku usaha.

7. Tingkatkan Pelayanan Prima, Inspektur Ikuti Bimtek Pemahaman Ceklist dan Tata Cara Audit Sertifikasi CDOB PBF

Tingginya tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik bidang Obat dan Makanan serta semakin meningkatnya tantangan dalam melakukan Audit Sertifikasi PBF, Inspektur BBPOM di Jakarta perlu akan peningkatan kompetensi

dan penyegaran informasi teraktual dalam Pemahaman Ceklist dan Tata Cara Audit Sertifikasi CDOB PBF. Bimtek yang rutin dilaksanakan setiap hari Jum'at oleh Bidang Pemeriksaan yang



dikenal dengan kegiatan SAMSON (Satu Jam Sharing Online) dibuka oleh Bapak Kepala BBPOM di Jakarta yang memberikan arahan terkait pelayanan publik prima, menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat Narkotika Psikotropika dan Prekursor BPOM (Ibu Lili dan Ibu Teti) terkait materi Implementasi dan Tantangan Sertifikasi CDOB, dan dihadiri oleh 26 (dua puluh enam) inspektur. Diskusi interaktif menambah keseruan bimtek yang membahas segala kendala dan perkembangan isu terkini dalam proses Sertifikasi CDOB PBF.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
HIGHLIGHT KINERJA	iii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Isu Strategis	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis.....	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	33
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	35
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	38
BAB III AKUNTABILITAS	42
3.1 Uraian Singkat Rencana Strategis.....	43
BAB IV PENUTUP	142
4.1 Kesimpulan.....	142
2.2 Saran.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis lingkungan strategis Balai Besar POM di Jakarta.....	11
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024	20
Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	33
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	35
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	39
Tabel 6. Kriteria pencapaian kinerja	42
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I.....	43
Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	49
Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	53
Tabel 10. Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021	56
Tabel 11. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021	58
Tabel 12. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	62
Tabel 13. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	65
Tabel 14. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	67
Tabel 15. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	69
Tabel 16. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	72

Tabel 17. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	76
Tabel 18. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021	79
Tabel 19. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	87
Tabel 20. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	89
Tabel 21. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2021.....	92
Tabel 22. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2021.....	94
Tabel 23. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2021	97
Tabel 24. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	100
Tabel 25. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	102
Tabel 26. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021	105
Tabel 27. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021.....	109
Tabel 28. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021	113
Tabel 29. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021.....	115
Tabel 30. Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021	118
Tabel 31. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2021Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuj	122

Tabel 32. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	124
Tabel 33. Kategori Penilaian SAKIP	125
Tabel 34. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021	127
Tabel 35. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2021.....	129
Tabel 36. Nilai kinerja anggaran BBPOM di Jakarta tahun 2021	131
Tabel 37. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan I tahun 2021	135
Tabel 38. Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan I tahun 2021	138
Tabel 39. Efisiensi kegiatan Per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta.....	140

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta	4
Gambar 2. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Maret 2021	8
Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta	9
Gambar 4. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021	10
Gambar 5. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta	19
Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta.....	23
Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018-2021	61
Gambar 8. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	64
Gambar 9. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan tahun 2020	69
Gambar 10. Perbandingan Persentase Keputusan atau Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2019 dan 2021	74

Gambar 11. Perbandingan Persentase Keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2020 dan 2021.....	78
Gambar 12. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2021	82
Gambar 13. Perbandingan persentase realisasi dan capaian sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	89
Gambar 14. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024.....	143
Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Laboratorium Triwulan I Tahun 2021	147
Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Iklan dan Label/Penandaan Triwulan I Tahun 2021	161
Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Triwulan I Tahun 2021	169

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;

3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Tugas Pokok Balai Besar POM di Jakarta**

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Fungsi Balai Besar POM di Jakarta**

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta

Tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Kelompok Substansi Pengujian** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di kelompok substansi pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pengujian menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyusunan rencana dan program di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 2. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Kelompok Substansi Pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Pengujian terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Pengujian Kimia;
2. Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. Subkelompok

Substansi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

b. **Kelompok Substansi Pemeriksaan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di subkelompok substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di Substansi inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Substansi Pemeriksaan terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Inspeksi;
2. Subkelompok Substansi Sertifikasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta

pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Subkelompok Substansi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. **Substansi Penindakan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. **Substansi Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. **Bagian Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 4. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
 5. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

1. Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi;
2. Subkelompok Substansi Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subkelompok Substansi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. *Subkelompok Substansi Umum* mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.4. Isu Strategis

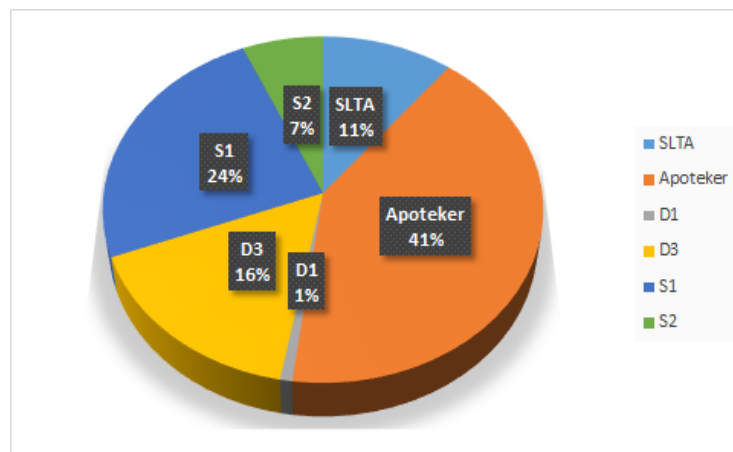
1.4.1 Aspek Strategis Organisasi

Berikut adalah aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta:

a. Lingkungan Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Jakarta sebanyak 119 orang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada **Gambar 2**. Rincian distribusi pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Data Pegawai Balai Besar POM di Jakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan per 31 Maret 2021

2. Sumber Daya Lainnya

Kantor Balai Besar POM di Jakarta hanya memiliki 1 (satu) bangunan gedung dengan total luas tanah 2.750,00 m² dan luas bangunan 2.404,00 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Jakarta memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017.

Selain itu, Balai Besar POM di Jakarta dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya.

3. Keunggulan Balai Besar POM di Jakarta

Program laboratorium keliling yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2017.

4. Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Jakarta bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2021 No. SP DIPA-063.01.2.432747/ 2021 yang diterbitkan pada tanggal 27 November 2020 sebesar 47.430.798.000 (empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

b. Lingkungan Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

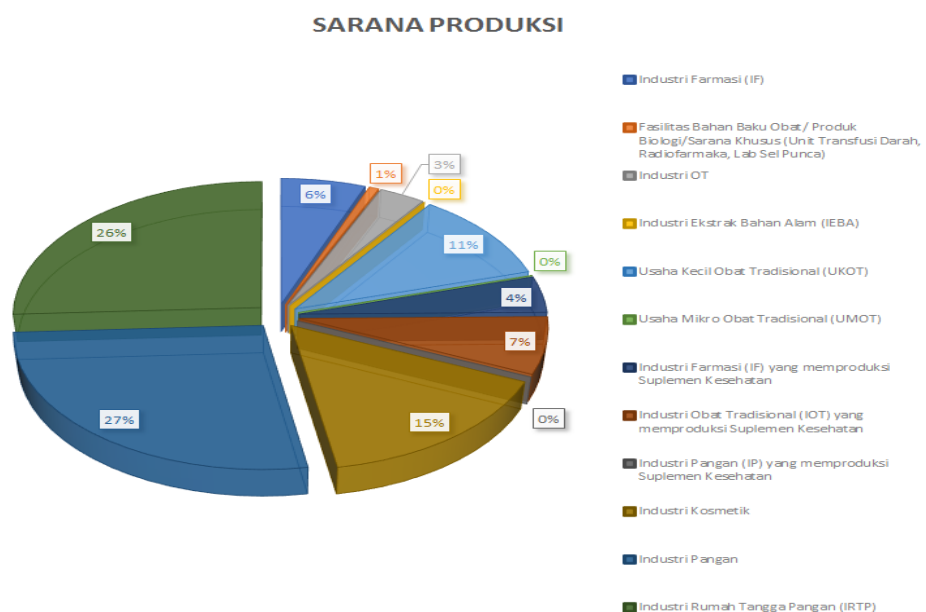
Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662,33 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa.

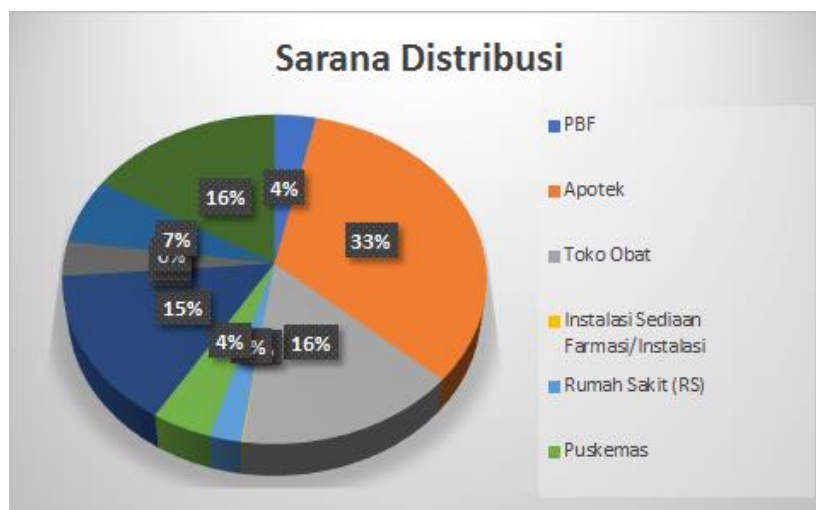


Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

2. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca), industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, GInstalasi Sediaan Farmasi/Instalasi, Rumah Sakit (RS), Puskesmas, Klinik, Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan), Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan, Fasilitas Distribusi Kosmetik, Fasilitas Distribusi Pangan Olahan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana pada **Gambar 4** di bawah ini.





Gambar 4. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Analisis lingkungan strategis Balai Besar POM di Jakarta

KEKUATAN	KELEMAHAN
- Dasar hukum yang jelas terkait tugas, fungsi dan kewenangan dalam pengawasan obat dan makanan - Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Balai Besar POM di Jakarta menerapkan RB - Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> - Kompetensi ASN Balai Besar POM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas - Pengembangan TIK dalam meningkatkan pelayanan pengawasan obat dan makanan - <i>Mobile lab</i> dan mini laboratorium - Integritas pelayanan publik - Fasilitas laboratorium yang memadai - Penyebaran informasi melalui	- Lokasi kantor BBPOM di Jakarta tidak strategis - Integrasi beberapa sistem mutu belum efisien - Masih memerlukan waktu yang lama dalam Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengujian - ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu - Sarana prasarana belum optimal - Penggunaan sistem TIK dalam melakukan pelayanan dan pengawasan obat dan makanan masih belum optimal - Kelembagaan Pusat dan Balai belum sinergi - Undang-undang pengawasan obat dan makanan masih bersifat umum - Adanya tumpang tindih kewenangan dengan Kemenkes

saluran komunikasi di media <i>online</i>, cetak dan media sosial - Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha - Kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam penindakan dan penegakan hukum, - Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung yang memadai - <i>Networking</i> yang kuat dengan lembaga- lembaga pusat/daerah - Laboratorium telah terakreditasi ISO 17025 : 2017 - Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat sertifikat QMS ISO 9001:2015	
PELUANG	TANTANGAN
- Ekspektasi masyarakat yang tinggi terkait peran dalam pengawasan obat dan makanan - Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat - Pertumbuhan konsumsi obat dan makanan masyarakat - Perkembangan <i>e-commerce</i> ke depan cukup besar - Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan - Jenis produk obat dan makanan sangat bervariasi - Perkembangan industri obat dan makanan yang terus mengalami peningkatan - Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia - Perkembangan Teknologi Informasi untuk pelayanan	- Semakin maraknya penjualan obat dan makanan <i>online</i> - Besarnya pangsa pasar obat tradisional - Adanya penggunaan obat bahan alam di fasilitas pelayanan kesehatan - Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan - Lemahnya penegakan hukum sehingga tidak ada efek jera - Kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah - Rendahnya pengetahuan dan kemampuan teknis UMKM obat tradisional - Peningkatan penggunaan produk-produk <i>lifestyle</i> - Adanya bonus demografi pada periode 2020-2024 - Peningkatan daya saing pelaku usaha - Peningkatan jumlah sarana Produksi dan distribusi obat dan makanan

secara <i>online</i> - Dukungan Pemda dalam bentuk MoU, Perjanjian Kerjasama dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan - Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi - Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik - Perkembangan iklan yang begitu ceat dan kompetitif termasuk iklan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan	- Modus pelanggaran semakin kompleks - Meningkatnya penyebaran informasi <i>hoax</i> terkait obat dan makanan - Adanya program Nasional (JKN dan SKN) - Implementasi program fortifikasi pangan
---	--

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang merupakan isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Jakarta antara lain:

1. **Generasi *Stunting* Mengancam Masa Depan Bangsa**

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan

Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah / PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Jakarta melakukan *sampling* produk Obat dan Makanan yang dijual secara *online* berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Jakarta meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal, dilakukan pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap

pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan *sampling* dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota Administratif, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Hoaks terkait Obat dan Makanan

Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait obat dan makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi obat dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain melalui HaloBPOM, media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, *Car Free Day*, *talkshow*, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM *Mobile*, dan penyebaran informasi melalui *website* BPOM.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

6. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu

adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindak lanjut perlu disiapkan. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Jakarta sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

7. Pandemi COVID-19

COVID-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO (*World Health Organization*) pada 11 Maret 2020. Kasus pasien COVID-19 di Indonesia meningkat signifikan sejak diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Oleh karena itu, untuk mencegah penyebaran infeksi COVID-19 telah dikeluarkan strategi dan kebijakan oleh pemerintah antara lain pembatasan interaksi dan mewajibkan untuk bekerja dari rumah (*work from home/ WFH*). Kondisi ini mempengaruhi semua kegiatan yang merupakan tugas pokok Balai Besar POM di Jakarta. Dari semula semua kegiatan berbasis interaksi langsung menjadi interaksi jarak jauh. Penyelenggaraan layanan dilakukan untuk menjamin keamanan dalam kondisi darurat dalam rangka tetap melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan di Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah

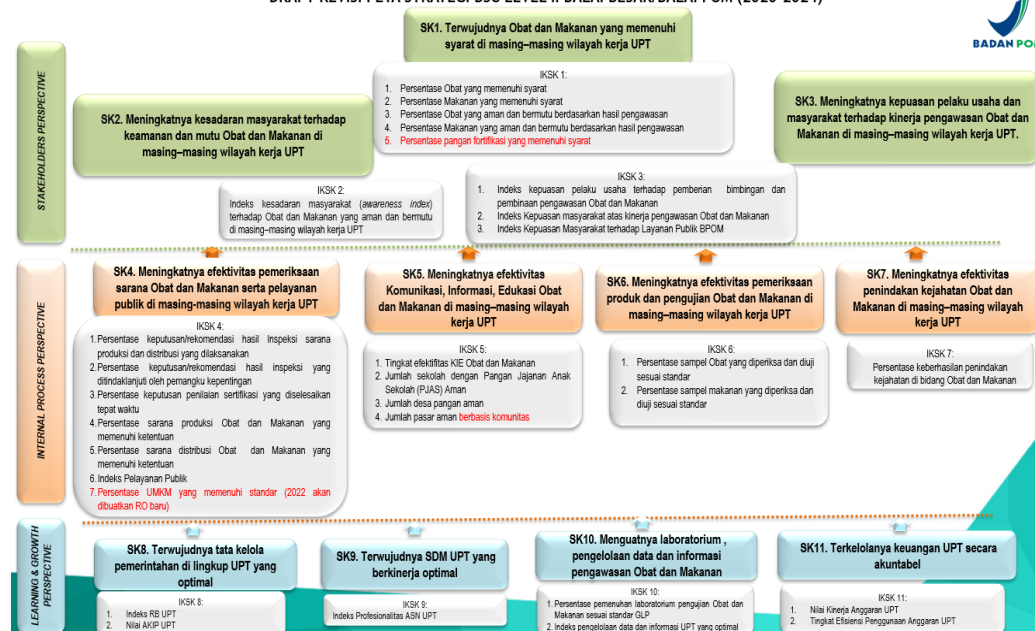
pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
2. Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan;
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan; dan
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:



Gambar 5. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 28 (dua puluh delapan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel 2 berikut.

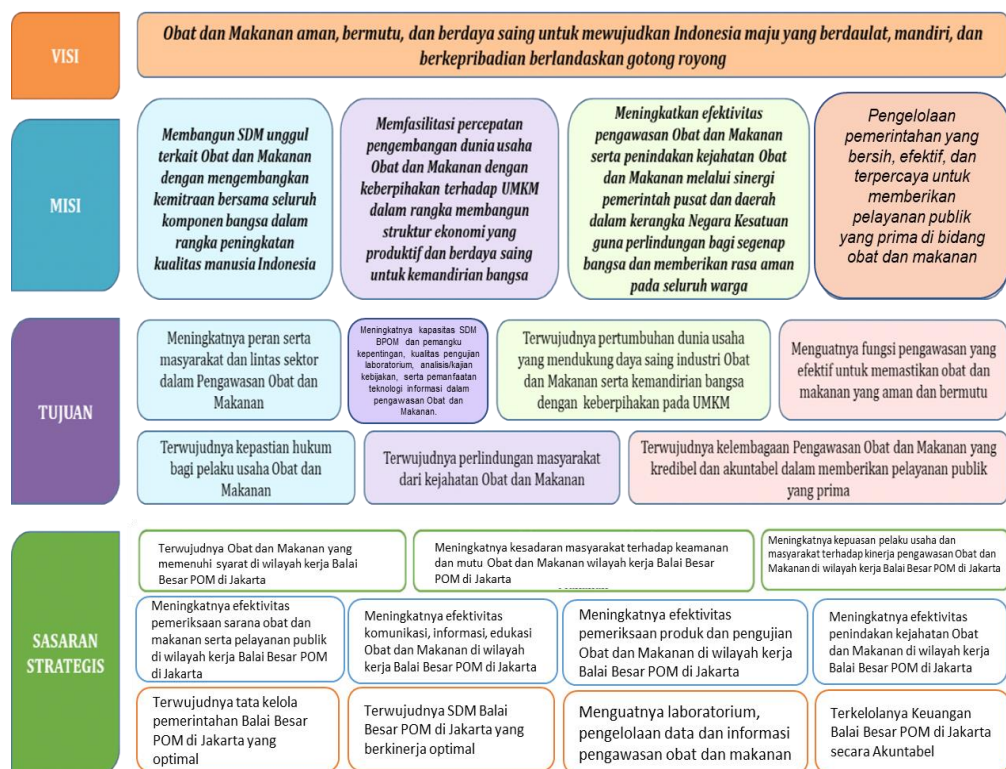
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
	Stakeholder						
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78,5	79	79,5	80
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	78	80	83	86
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87,5	89
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90,5	91	91,5	92
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	60,2	70,5	75,5	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	48	52	54	56
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	59	60	62
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
	Internal Process						
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	80	102
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	89,5	90	90,5	91

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	40	49	57	65
Learning and Growth							
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	90	93	94	95
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	85	90	91	92
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	77	80	82	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	82,5	83	83,5	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (versi renja) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis
Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut:

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective):

a. Sasaran Strategis 1: *Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada

produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

Kedua, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia termasuk Balai Besar POM di Jakarta.

Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang *disampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 86,5%**
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 80%**
- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 86,5%**
- (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir tahun 2021 ditargetkan sebesar 78,5%**

b. Sasaran Strategis 2: *Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Jakarta melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): **Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 75 pada akhir tahun 2021.**

c. Sasaran Strategis Ke-3: *Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, Balai Besar POM di Jakarta berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai Besar POM di Jakarta bertujuan untuk mendukung

kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 84 di tahun 2021;**
- (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 74 di tahun 2021; dan**
- (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan target sebesar 88,4 di tahun 2021.**

Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective):

a. Sasaran Strategis 4: *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 89% pada akhir tahun 2021;**
- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 60,2% pada akhir tahun 2021;**
- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 85% pada akhir tahun 2021;**
- (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 3,76% pada akhir tahun 2021;**

- (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 48% pada akhir tahun 2021; dan**
- (6) Indeks pelayanan publik, dengan target 57 pada akhir tahun 2021.**

b. Sasaran Strategis 5: *Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu:

- (1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target 90,99 pada akhir tahun 2021;**
- (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan target 40 pada akhir tahun 2021;**
- (3) Jumlah desa pangan aman dengan target 14 pada akhir tahun 2021; dan**
- (4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya dengan target 2 pada akhir tahun 2021**

c. Sasaran Strategis 6: *Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jakarta perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus

meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 90,5% pada akhir tahun 2021; dan**
- (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 89,5% pada akhir tahun 2021.**

d. Sasaran Strategis 7: *Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta*

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 40% pada akhir 2021.**

Perspektif Pembelajaran (Learning and Growth Perspective):

a. Sasaran Strategis Ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM.

Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Jakarta untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Balai Besar POM di Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 85 pada akhir tahun 2021; dan**
- (2) Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta, dengan target 85 pada akhir tahun 2021.**

b. Sasaran Strategis 9: *Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal*

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan Balai Besar POM di Jakarta.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta dengan target sebesar 77 di tahun 2021.**

c. **Sasaran Strategis Ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*.

Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Balai Besar POM di Jakarta telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai.

Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai Besar POM di Jakarta. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- (1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 75% pada 2021; dan**
- (2) **Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal dengan target 2 pada tahun 2021.**

d. **Sasaran Strategis 11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai Besar POM di Jakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- (1) **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target 94 sebesar pada tahun 2021; dan**
- (2) **Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dengan target Efisien (95%) pada tahun 2021.**

2.2. Rencana Kerja Tahunan 2021

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2021.

Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,5
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,5
2.	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	05-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75
3.	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		07-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		08-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,4
4.	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	09-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,2
		11-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		12-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	3,76
		13-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
		14-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	57
5.	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	15-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99
		16-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		17-Jumlah desa pangan aman	14
		18-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6.	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	19-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,5
		20-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89,5
7.	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40
8.	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	22-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	85
		23-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	85
9.	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	24-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	77
10.	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		26-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2
11.	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	27-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	94
		28-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 47.430.798.000,- (empat puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,5
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,5
2	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja	05-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Balai Besar POM di Jakarta		
3	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84
		07-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	74
		08-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,4
4	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	09-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,2
		11-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		12-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	3,76
		13-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48
		14-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	57
5	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	15-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99
		16-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		17-Jumlah desa pangan aman	14
		18-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	19-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90,5
		20-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89,5
7	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah	21-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	kerja Balai Besar POM di Jakarta		
8	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	22-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	85
		23-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	85
9	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	24-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	77
10	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75
		26-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2
11	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	27-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	94
		28-Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana aksi perjanjian menjabarkan target kinerja triwulan untuk indikator yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target				
	B03	B06	B09	B12	Anggaran (Rupiah)
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	459.504.850
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%	269.862.250
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	459.504.850
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,5%	78,5%	78,5%	78,5%	269.862.250
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	78	189.354.990
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84	113.559.800
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	75	189.354.990
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	90,5	2.267.501.500
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	89%	283.899.500
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,2%	60,2%	60,2%	60,2%	283.899.500
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	85%	85%	85%	272.400.000

Indikator Kinerja	Target				
	B03	B06	B09	B12	Anggaran (Rupiah)
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48%	48%	48%	48%	103.968.000
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	57%	57%	57%	350.271.200
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	3,76	195.093.020
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	-	90,99	90,99	90,99	1.774.000.000
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	15%	40%	60%	40	641.506.000
	(progress)	(progress)	(progress)		
Jumlah desa pangan aman	15%	40%	60%	14	1.014.429.000
	(progress)	(progress)	(progress)		
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	15%	40%	60%	2	100.431.000
	(progress)	(progress)	(progress)		
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	90,50%	393.861.300
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	36%	53%	89,50%	231.310.500
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10%	20%	30%	40	1.758.622.000
Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	90	396.473.500

Indikator Kinerja	Target				
	B03	B06	B09	B12	Anggaran (Rupiah)
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	85	554.367.000
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	77	24.573.416.000
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>	-	-	-	75	9.204.764.500
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2	2	2	2	128.740.000
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	14	37	56	94	396.473.500
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	554.367.000

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria pencapaian kinerja

Kriteria	Capaian	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2021 Triwulan I terhadap target yang telah ditetapkan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2021 Triwulan I Balai Besar POM di Jakarta belum semua sasaran strategis dapat dihitung capaian dan ditetapkan kriterianya.

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan I

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	103,17	Baik
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	124,61	Tidak dapat disimpulkan
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100	Baik
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75,47	Cukup
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	107,37	Baik
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	-	-
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	79% Efisien	Cukup

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 28 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

No	Perspektif	Sasaran strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
				TW I		(%)	
1	Stakeholder	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,50%	81,25%	93,93%	Baik
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	92,06%	115,08%	Sangat Baik
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,50%	87,50%	101,16%	Baik
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,50%	82%	102,50%	Baik
		2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	-
		3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
			Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	-	-	-	-
		4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	97,19%	109,20%	Baik
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60,20%	83,84%	139,27%	Tidak dapat disimpulkan

			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	81,34%	95,69%	Baik
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	48%	60,66%	126,37%	Tidak dapat disimpulkan
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	86,94%	152,53%	Tidak dapat disimpulkan
			Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	-	-	-	-
2	Internal Process	5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,99	-	0	-
			Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20% (Progress)	20% (Progress)	100% (Progress)	Baik
			Jumlah desa pangan aman	25% (Progress)	25% (Progress)	100% (Progress)	Baik
			Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25% (Progress)	25% (Progress)	100% (Progress)	Baik
		6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	10,36%	74%	Cukup
			Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	14%	10,77%	76,93%	Cukup
		7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10%	10,74%	107,37%	Baik

3	Learning and Growth	8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	-
			Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	-
		9. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	-	-	-	-
		10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	-	-	-
			Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2	-	-	-
		11. Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	14	-	-	-
			Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	(95%)	(75%)	79%	Cukup

*) dihitung terhadap target sesuai target APBN-P

Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator mencapai target dengan kriteria “**sangat baik**”, 9 (sembilan) indikator mencapai target dengan kategori “**baik**”, target dengan 3 (tiga) indikator mencapai kategori “cukup”, 1 (satu) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”.

Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.

Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, *banner* dan poster di tempat-tempat strategis dan informasi di media sosial serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase obat yang memenuhi syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 8. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	86.5	86.5	81.25	93.93	Baik

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka *sampling* acak di tahun berjalan. Sampel Obat yang *disampling* sesuai dengan pedoman *sampling* tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil *sampling* Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk kriteria 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai dan Loka.

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yaitu **93.93 %** dengan kriteria “**Baik**”.

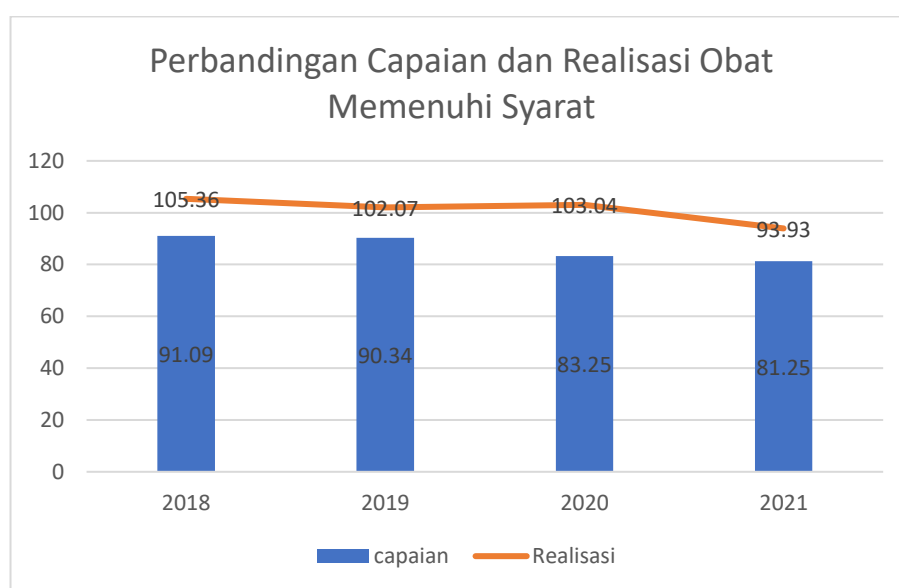
b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, diantaranya adalah:

1. Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri farmasi wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi;
2. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta;
3. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas; dan
4. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

c. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya adalah, telah dilakukan peningkatan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten. Adapun kendala operasional laboratorium untuk pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah bisa diatasi karena pemantauan pemeliharaan alat sudah dilakukan secara lebih ketat dengan menugaskan personil sebagai penanggungjawab pemantauan tersebut. sehingga ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya.



Gambar 7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018-2021

Terdapat perubahan definisi operasional untuk Indikator Kinerja Utama “persentase obat yang memenuhi syarat” mulai tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018, persentase obat yang memenuhi syarat hanya diperhitungkan dari hasil pengujian komoditi obat yang disampling secara targeted dan juga tidak memperhitungkan evaluasi penandaan. Untuk tahun 2019, persentase obat yang memenuhi syarat masih tetap diperhitungkan dari hasil pengujian komoditi obat saja tetapi samplingnya secara acak dan *targeted* serta sudah memperhitungkan hasil evaluasi penandaan. Sedangkan di tahun 2020 dan 2021, persentase obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan gabungan sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang

disampling secara acak. Dengan adanya perubahan definisi operasional yang sangat signifikan untuk Indikator Kinerja Utama “persentase obat yang memenuhi syarat” dari tahun 2018 sampai 2020, maka capaian di tahun 2021 hanya dapat dibandingkan dengan capaian 2020, tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, diantaranya adalah:

1. Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri farmasi wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
2. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta.
3. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas.
4. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya adalah, telah dilakukan peningkatan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten. Adapun kendala operasional laboratorium untuk pemeliharaan alat laboratorium tahun 2020 sudah bisa diatasi karena pemantauan pemeliharaan alat sudah dilakukan secara lebih ketat dengan menugaskan personil sebagai penanggungjawab pemantauan tersebut, sehingga ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 9. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	80	80	92.06	115.08	Sangat Baik

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka *sampling* acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
2. Produk kadaluarsa;
3. Produk rusak;
4. Tidak memenuhi ketentuan label; dan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil *sampling* Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama

hingga kriteria poin 5. Jika termasuk kriteria 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

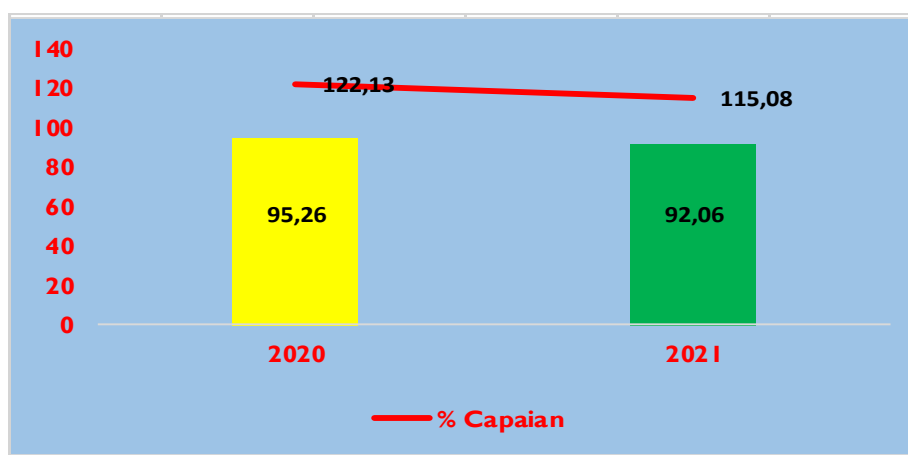
$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka.

Capaian persentase pangan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta 2021 Triwulan I sudah **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 115.08% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020



Gambar 8. Grafik Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Triwulan 1 tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2020, namun masuk dalam kriteria yang lebih baik (dari “tidak dapat disimpulkan” di tahun 2020, menjadi “sangat baik” di triwulan I tahun 2021).

Indikator capaian dihitung terhadap hasil sampling acak dibandingkan jumlah sampel yang diperiksa.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2021 sudah mencapai target dengan kriteria sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa produk makanan yang beredar di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi standar keamanan dan mutu serta memenuhi ketentuan penandaan. Menurunnya capaian disebabkan penetapan target tahun 2021 ditingkatkan, namun penetapan target tahun 2021 sudah mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Kondisi pandemi Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk makanan yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

1. Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi makanan yang Baik (CPMB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi;
2. Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman; dan
3. Pengembangan metode analisa yang menyesuaikan dengan tren produk beredar.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan 1 tahun 2021*

Tabel 10. Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.5	86.5	87.5	101.16	Baik

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian persentase obat yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 Triwulan I yaitu 101.16% dengan kriteria “**Baik**”.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020-2018*

Indikator kinerja utama “Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator mulai ditetapkan di tahun 2020. Realisasi persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang disampling secara targeted. Dengan demikian data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu pada tahun 2021 sudah melebihi target dengan kriteria “Baik “. Hal ini menunjukkan bahwa produk obat yang beredar di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi standar keamanan dan mutu serta memenuhi ketentuan penandaan. Tingginya capaian disebabkan penetapan target tahun 2020 terlalu rendah, namun penetapan target tahun 2021 sudah mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk obat yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk obat yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang aman dan bermutu, antara lain:

1. Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (*GMP*) sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan *GMP* maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (*CAPA*) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi;
2. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta;
3. Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas; dan
4. Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

1. Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi;
2. Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Obat untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman; dan
3. Pengembangan metode analisa yang menyesuaikan dengan tren produk beredar.

4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan 1 tahun 2021*

Tabel 11. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	78.5	78.5	82.0	102.50	Baik

Persentase Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

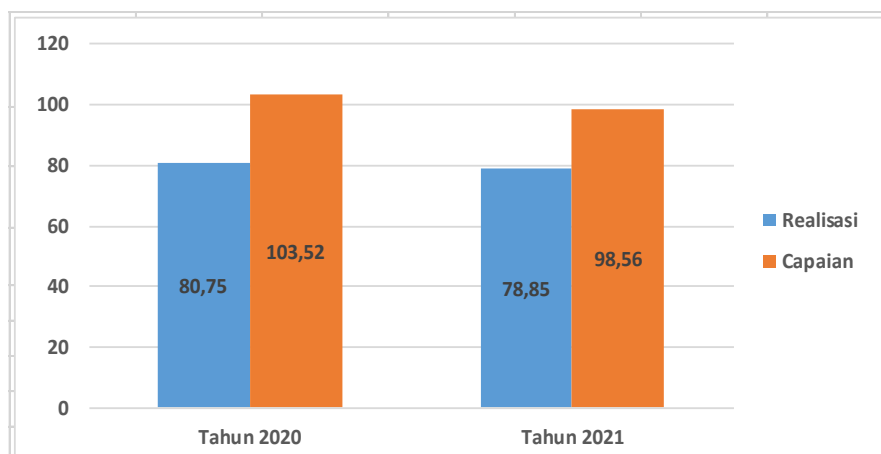
Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 102,50% dengan kriteria **“baik”**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020

Indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator yang ditetapkan di tahun 2020 dan masih digunakan di tahun 2021. Data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara targeted. Untuk capaian triwulan 1 tahun 2021 terdapat sedikit penurunan dibanding capaian tahun 2020, namun masih masuk dalam kriteria **“baik”**.



Gambar 9. Perbandingan realisasi dan capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 dengan tahun 2020

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4}{4}$$

4

$$NPS = \frac{93.93\% + 115.08\% + 101.16\% + 102.50\%}{4}$$

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2021 mencapai target yang ditetapkan yaitu 102.5% dengan kriteria baik. Untuk tahun 2020 dan 2021, pemeriksaan sampel Makanan yang aman dan bermutu sudah memperhitungkan penandaan label, sampel tanpa ijin edar, kadaluarsa dan rusak. Persentase Makanan yang aman dan bermutu di tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun masih melebihi target yang ditetapkan.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

1. Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi makanan yang Baik (CPMB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi
2. Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman
3. Pengembangan metode analisa yang menyesuaikan dengan tren produk beredar.

- e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*
1. Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi makanan yang Baik (CPMB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi;
 2. Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman; dan
 3. Pengembangan metode analisis yang menyesuaikan dengan tren produk beredar.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4}{4}$$

4

$$NPS = \frac{93.93\% + 115.08\% + 101.16\% + 102.50\%}{4}$$

Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan 1 tahun 2021

Tabel 12. Realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	78	-	-	-	-

Indeks kesadaran masyarakat merupakan ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) dalam memilih Obat dan Makanan. Kesadaran yang diukur mencakup beberapa aspek yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku.

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Aspek pengetahuan mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi manfaat produk,

ciri-ciri produk yang aman dan bermutu, produk yang tidak aman dan berbahaya, aturan pakai yang tepat serta logo golongan pada kemasan Obat. Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran Obat atau Obat Tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. Aspek sikap mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi sikap dalam menangani produk kedaluwarsa, tidak aman dan berbahaya serta palsu, dan cara melakukan penyimpanan produk.

Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. Aspek perilaku mengenai Obat dan Makanan aman dan bermutu meliputi perilaku dalam menyimpan produk, membaca label/kemasan/dus/brosur, produk aman dan bermutu.

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan metode *multistage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% dan dilaksanakan di 34 provinsi dengan estimasi level provinsi. Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga. Survei menggunakan stratifikasi daerah perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*). Tahap pemilihan sampel-*Two Stage Cluster Sampling* yaitu memilih blok sensus secara PPS (*Probability Proportional Size*) yaitu sampling dengan size jumlah rumah tangga di setiap strata provinsi perkotaan/pedesaan dan selanjutnya memilih sebanyak 10 rumah tangga secara sistematis sampling dari setiap blok sensus terpilih dari daftar populasi rumah tangga.

Pengumpulan data dengan melakukan wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap target responden. Subyek studi adalah anggota rumah tangga yang menggunakan produk Obat dan Makanan berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan termasuk dalam Daftar Sampel Rumah Tangga (DSRT) dalam Daftar Sampel Blok Sensus (DSBS) sebanyak 1157 blok sensus. Setiap blok sensus berjumlah 10 responden dan total berjumlah 11570 responden di 34 Provinsi di Indonesia. Teknik pengambilan sampel telah dilakukan pengacakan oleh pihak BPS sehingga tingkat keterwakilan dan keacakan (random) sampel sangat tinggi. Untuk responden rumah tangga, unit sampling terkecil dalam survei ini adalah rumah tangga sesuai Blok Sensus BPS. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat untuk mendapatkan nilai indeks kesadaran masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 - 60
Cukup Baik	60 - 75
Baik	75 - 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks} = (I_i - I_{\min}) / (I_{\max} - I_{\min}) \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan:

- I_i = skor faktor ke- i
- $I_{\min}$ = skor faktor minimal
- $I_{\max}$ = skor faktor maksimal
- n = banyaknya responden

- b. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2021, sehingga pada triwulan I belum ada realisasi dan capaian.

Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 13. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka. Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Melalui survei dengan metode *multistage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10%.

Kriteria yang digunakan adalah:

Cara perhitungan (cara memperoleh nilai indeks):

$$\text{Indeks} = (I_i - I_{\min}) / (I_{\max} - I_{\min}) \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan

I_i	= skor faktor ke- i
$I_{\min}$	= skor faktor minimal
$I_{\max}$	= skor faktor maksimal
n	= banyaknya responden

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2021, sehingga pada triwulan I belum ada realisasi dan capaian.

7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 14. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	-	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah hasil pengukuran dari survei berupa angka dari hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Makanan termasuk produk layanan yang diawasi BPOM. Indikator pembentuk terdiri atas 5 (lima) indikator, yaitu: (1) *Reliability*, kemampuan pengawasan Obat dan Makanan; (2) *Assurance*, kemampuan memberikan perlindungan; (3) *Tangible*, layanan informasi tentang keamanan produk; (4) *Empathy*, kepedulian atas kebutuhan masyarakat untuk produk yang aman; (5) *Responsiveness*, tindakan atas produk berbahaya. Lingkup pertanyaan kuesioner kepuasan masyarakat meliputi kepuasan terhadap kinerja dan layanan BPOM serta pertanyaan tambahan terkait Covid-19.

Pengukuran Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan menggunakan survei yang bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan

margin of error 10%. Hasil survei ini digunakan sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengawasan produk Obat dan Makanan.

Unit observasi adalah rumah tangga dengan menggunakan dua jenis kerangka sampel, yaitu kerangka sampel blok sensus dan kerangka sampel rumah tangga.

Adapun kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks} = (I_i - I_{\min}) / (I_{\max} - I_{\min}) \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan

- I_i = skor faktor ke- i
 $I_{\min}$ = skor faktor minimal
 $I_{\max}$ = skor faktor maksimal
 n = banyaknya responden

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2021, sehingga pada triwulan I belum ada realisasi dan capaian.

8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2021

Tabel 15. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN ITAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN ITAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	90.5	-	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 10% terhadap responden yaitu Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

Kategori	Interval Indeks
Tidak Baik	< 45
Kurang Baik	45 – 60
Cukup Baik	60 – 75
Baik	75 – 90
Sangat Baik	≥ 90

Cara memperoleh nilai indeks dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks} = (I_i - I_{\min}) / (I_{\max} - I_{\min}) \times 100, \text{ dengan } i=1,2, \dots, n.$$

Keterangan

I_i = skor faktor ke- i

$I_{\min}$ = skor faktor minimal

$I_{\max}$ = skor faktor maksimal

N = banyaknya responden

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2021, sehingga pada triwulan I belum ada realisasi dan capaian.

b. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Hasil indeks kepuasan terhadap layanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2020 masuk kategori Baik yaitu dengan realisasi sebesar 88.19. Target kinerja indeks kepuasan terhadap layanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2021 ini ialah 90.5, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja. Rencana aksi yang diperlukan untuk mendukung tercapainya target indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jakarta serta sekaligus menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik sejalan dengan target diperolehnya predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022 adalah meningkatkan inovasi pelayanan publik serta sarana dan prasarana untuk pelayanan publik yang ada, antara lain:

1) Layanan Informasi dan Pengaduan

Untuk meningkatkan layanan informasi dan pengaduan, diperlukan upaya antara lain implementasi inovasi pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan *subsite* BBPOM di Jakarta, dan penyediaan sarana prasarana yang lebih memadai, seperti adanya nomor antrean dan pengadaan e-kios sebagai media informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses pelayanan publik yang ada di BBPOM di Jakarta.

2) Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga

Untuk meningkatkan Layanan Pengujian Sampel Pihak Ketiga, diperlukan upaya seperti penyediaan fasilitas pembayaran PNPB secara *cashless* di kantor BBPOM di Jakarta, informasi prosedur, tarif, dan waktu layanan serta penyediaan aplikasi pemantauan secara daring yang memudahkan proses pemberian layanan.

$$NPS = NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3$$

$$NPS = NA$$

Balai Besar POM di Jakarta belum mencapai sasaran dikarenakan indeks dihitung di akhir tahun 2021.

Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 16. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Persentase keputusan atau rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	97,19	109,20	Baik

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: Pelaku usaha; Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan} = (A+B+C+D)/4$$

- (1) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara perhitungan = (Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT x 100%

- (2) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT) x 100%

- (3) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

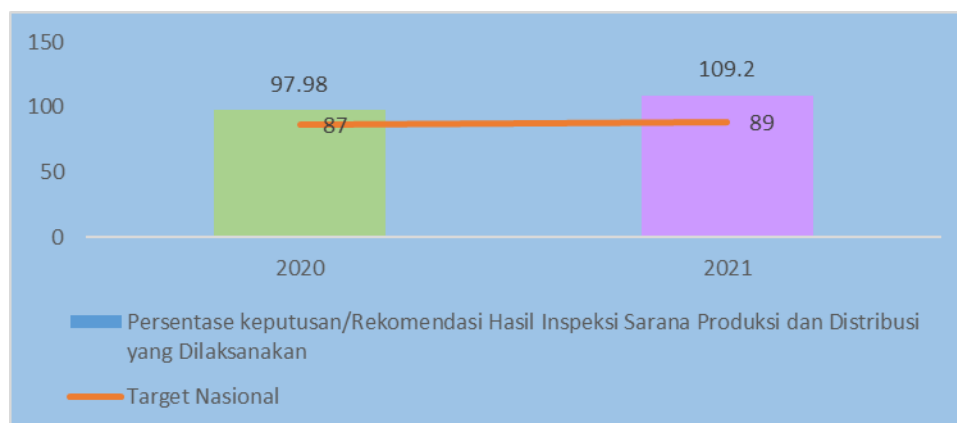
Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain / jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

- (4) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di tahun 2021 kurang dari target yang ditetapkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020.



Gambar 10. Perbandingan Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2019 dan 2021

Persentase capaian tahun 2020 sebesar 97,98 % (realisasi 85.23 % dari target 87 %) dengan kriteria “BAIK”, sama dengan persentase capaian TW 1 tahun 2021 sebesar 109,20 % dengan kriteria “Baik”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meningkatnya capaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh:

- Jumlah dan ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut oleh BBPOM di Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan, sudah sesuai timeline yang ditetapkan.
- Jumlah tindak lanjut dari BBPOM di Jakarta terhadap rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan sudah sesuai.
- Namun respon dari Pusat terhadap rekomendasi dari BBPOM di Jakarta untuk TW 1 ini belum ada walaupun sudah dilaksanakan koordinasi oleh BBPOM di Jakarta dengan unit pusat terkait.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Kelompok Substansi Pemeriksaan telah membuat spreadsheet ROTI BUAIA (<https://bit.ly/RotiBuaia2021>) yang menggabungkan seluruh rekap rekomendasi beserta tindak lanjutnya sehingga memudahkan penghitungan dan penelusuran data.
- Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem si DOEL (Sistem Spreadsheet Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut). Pada system ini berupa form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta.
- Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor melalui Spreadsheet Diskoria sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya.
- Konsistensi dan komitmen penuh dari semua petugas pada kelompok substansi Pemeriksaan dalam membuat segera tindaklanjut terhadap hasil inspeksi yang dilaksanakan sehingga tindaklanjut lebih cepat dan semua hasil pengawasan ditindaklanjuti sesuai dengan pedoman tindaklanjut. Konsistensi ini tercipta dengan adanya pengawasan melekat dan dilakukan zoom meeting kelompok substansi pemeriksaan setiap hari pukul 8.00 yang membahas semua permasalahan dan mendiskusikan tindaklanjut dan pemecahan semua permasalahan dan juga ajang pengumuman hasil pertemuan baik dari pertemuan internal maupun eksternal.

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 17. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	60,2	60,2	83,84	139,27	Tidak Dapat Disimpulkan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepadalintas sektor}} \times 100\%$$

Realisasi keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Provinsi DKI Jakarta sebesar 83,84 % sudah lebih mencapai target yang ditetapkan yaitu 60,20%. Untuk persentase capaian dari realisasi tersebut sebesar 139,27 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, tetap diperlukan peningkatan agar realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, dan untuk TW I kriteria Tidak Dapat Disimpulkan tersebut karena masih menunggu hasil capaian Triwulan berikutnya.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020.*

Capaian pada indikator ini belum bisa dibandingkan dengan tahun 2020, dikarenakan untuk tahun 2020 tidak terdapat indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholder*.



Gambar 11. Perbandingan Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta antara Tahun 2020 dan 2021

Persentase capaian tahun 2020 sebesar 136,02 % (realisasi 75,49 % dari target 55 %) dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, sama dengan persentase capaian TW 1 tahun 2021 sebesar 139,27 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” juga.

c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

- Semakin banyak jumlah respon dari pelaku usaha terhadap surat tindak lanjut yang dikirim BBPOM di Jakarta maka akan semakin tinggi capaian indikator kinerjanya.
- Semakin banyak tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor maka akan semakin tinggi juga capaian indikator kinerjanya. Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait menggunakan aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta, tetapi aplikasi ini harus diapprove BPOM Pusat sehingga menyebabkan belum adanya pembinaan yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan terhadap sarana PIRT yang melanggar.

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

- Semakin dioptimalkannya penggunaan Form CAPA yang diisi saat pemeriksaan misalnya sarana IFP/IFK dan sarana distribusi lain di wilayah DKI Jakarta.
- Mengirimkan surat rekomendasi (hardcopy) kepada Suku Dinas Kesehatan terkait untuk segera melakukan pembinaan sarana.
- Respon petugas Suku Dinas Kesehatan semakin sigap dan cepat terhadap rekomendasi yang dikirimkan via aplikasi SMARTPOM yang terintegrasi dengan SIPT versi 3.
- Kelompok Substansi Pemeriksaan telah membuat spreadsheet ROTI BUAIA (<https://bit.ly/RotiBuaia2021>) yang menggabungkan seluruh rekap rekomendasi beserta tindak lanjutnya sehingga memudahkan penghitungan dan penelusuran data.
- Adanya pertemuan dan diskusi secara berkala dengan lintas sector terkait terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta

11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 18. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	81,34	95,69	Baik

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- (1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT;
- (2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk;
- (3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
- (4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar;
- (5) Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
- (6) Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT/SK;
- (7) Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha (termasuk UMKM), sampel *early warning system*); dan
- (8) Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF.

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya

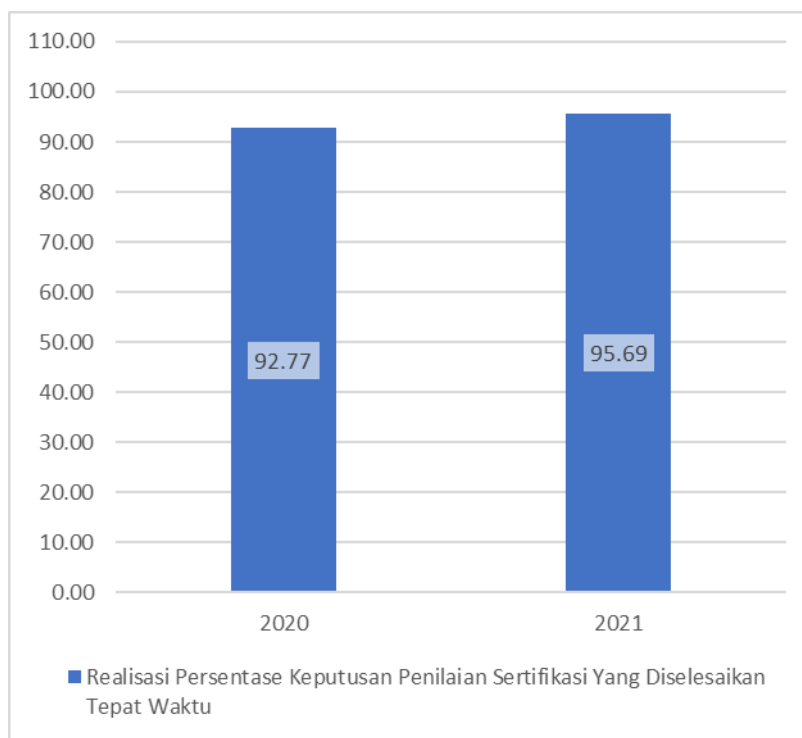
Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 81,34% dari target yang ditetapkan 85 %, jika dihitung terhadap target capaian sampai triwulan satu tahun 2021 sebesar 95,69% dengan kriteria “baik”. Secara umum untuk hasil capaian sampai triwulan satu ini, semua proses dalam rangka menerbitkan rekomendasi tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan.

Total seluruh keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan sampai dengan triwulan satu 2021 sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) yang seluruhnya memenuhi *timeline* yang telah ditetapkan. Sebanyak 170 keputusan merupakan kumulatif dari penyelesaian permohonan tahun 2020 dan 2021 yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) keputusan yang berasal dari permohonan tahun 2020 dan 109 (seratus sembilan) keputusan yang berasal dari permohonan tahun 2021.

Terdapat perbedaan definisi operasional pada keputusan Sertifikasi tahun 202, yaitu, keputusan sertifikasi tahun 2020 adalah jumlah rekomendasi yang diterbitkan terhadap permohonan yang diterima tahun 2020, sedangkan keputusan sertifikasi tahun 2021 adalah jumlah permintaan tindakan perbaikan yang diterbitkan untuk permohonan yang diterima tahun 2021 dan rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2021 yang berasal dari permohonan 2020.

Sampai dengan triwulan satu tahun 2021 terdapat 126 (seratus delapan puluh enam) permohonan yang diterima di Balai Besar POM di Jakarta dan telah diterbitkan keputusan sebanyak 109 (seratus sembilan) sehingga jumlah sarana yang prosesnya *carry over* ke triwulan berikutnya sebanyak sebanyak 17 (tujuh belas). Dari 17 permohonan yang belum terbit keputusan disebabkan karena dilakukan audit di akhir bulan Maret 2021 atau belum dilakukan audit

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020



Gambar 12. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2021

Berdasarkan grafik di atas, realisasi dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 terlihat kenaikan capaian. Tetapi hal ini belum bisa dibandingkan karena masih awal tahun dan harus dilihat capaian periode berikutnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat

rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.

Adanya perubahan Definisi Operasional (DO) pada tahun 2021 yang menyebutkan keputusan sertifikasi tahun berjalan adalah terbitnya rekomendasi dari Balai Besar POM di Jakarta dapat dihitung sejak terbitnya permintaan tindakan perbaikan hasil audit jika pada sarana masih ditemukan ketidaksesuaian. Hal ini menyebabkan peningkatan capaian pada triwulan pertama tahun 2021. Hal yang krusial dari penerbitan rekomendasi berupa perbaikan keseluruhan dari hasil audit tidak lagi menunggu respon perbaikan dari sarana yang berada diluar kendali Balai Besar POM di Jakarta. Dengan demikian kinerja dari Balai Besar POM di Jakarta tergambar dari capaian peningkatan kinerja tersebut.

Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan subsidi tenaga dari subkelompok substansi inspeksi dan dari kelompok substansi infokom yang memiliki kompetensi audit.

Namun dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi serta efisiensi SDM yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan audit online di saat pandemi merupakan salah satu solusi yang memberikan dukungan bagi tercapainya target kinerja sertifikasi, sehingga walaupun mobilitas dari petugas dikurangi dengan tatap muka, namun pekerjaan untuk menerbitkan rekomendasi guna mendukung tugas tetap dapat terlaksana sehingga akses terhadap kebutuhan pelayanan publik dapat teratasi.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan di tahun 2021 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain :

1. Fasilitasi UMKM Pangan secara simultan meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitasi UMKM Pangan OLahan membuat proses yang terjadi pada UMKM lebih cepat. Bukan hanya rekomendasi yang tepat waktu untuk pemeriksaan sarana

Balai akan tetapi ijin edar produk Pangan MD juga dapat dipercepat diperoleh oleh pelaku usaha.

2. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian ijin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (*Desk CAPA*) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. *Desk CAPA* triwulan satu 2021 diselenggarakan pada 9 Februari 2021 yang diselenggarakan secara daring dan diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan
3. Tantangan memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan ramah tentunya telah menjadi tuntutan masyarakat kini. Balai Besar POM di Jakarta sangat menyadari hal ini dan perlu didukung oleh kompetensi yang mumpuni dari setiap orang yang bertugas memberikan pelayanan publik. Untuk mendukung hal tersebut maka beberapa kali dilakukan pelatihan dan diseminasi oleh peserta pelatihan
4. Adanya *e-book* yang diterapkan pada tahun 2021 sehingga membantu pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dan menerapkan cara produksi dan distribusi yang baik pada sarannya, serta pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan untuk diaudit sertifikasi dengan mudah.
5. Kekurangan sumber daya yang ada dapat diatasi dengan beberapa tindakan terobosan yaitu Sistem rekap sarana dan system warning terhadap pelaku usaha yang bisa disetting secara *online* sehingga tidak harus ada petugas khusus yang membuat surat satu persatu secara manual. Selain itu inovasi *e-book* Pangan membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan dan penerapan cara produksi dan distribusi yang baik tanpa harus antri konsultasi sehingga mengurangi antrian konsultasi dan mempercepat proses.

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

1. Sebagian sarana pemahaman terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan.
2. Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan *awareness* dari pelaku usaha.
3. Kekurangan sumber daya dari petugas Balai POM di Jakarta juga membuat pelayanan kurang optimal karena beban kerja yang berlebih.

Untuk peningkatan kinerja tahun tahun berikutnya akan dikembangkan beberapa hal :

- a. Evaluasi program *desk CAPA* yang telah dilakukan pada tahun ini dan melakukan *desk CAPA* setiap triwulan. Mengingat keterbatasan sumberdaya *desk CAPA* akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran *desk CAPA* adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA;
- b. Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan *sharing knowledge* antara petugas di Bidang Pemeriksaan dan Bidang Infokom;
- c. Melakukan simplifikasi SOP dan dokumen atau formulir yang digunakan pada saat melakukan audit maupun pelaporan dan penerbitan keputusan sertifikasi;
- d. Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara *online* dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik; dan
- e. Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM.
- f. Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan *sharing knowledge* antara petugas di Bidang Pemeriksaan dan Bidang Infokom
- g. Melakukan simplifikasi SOP dan dokumen atau formulir yang digunakan pada saat melakukan audit maupun pelaporan dan penerbitan keputusan sertifikasi

- h. Memperkuat sosialisasi tentang pentingnya mutu dan keamanan produk secara *online* dengan penerapan Cara Produksi dan Distribusi yang Baik
 - i. Sistem terintegrasi dalam fasilitasi UMKM sehingga mempercepat proses fasilitasi UMKM.
- e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Pada tahun 2019 telah dilakukan reviu Renstra 2020 - 2024 seiring dengan terbentuknya OTK baru di Balai Besar POM di Jakarta. Pada Renstra sebelumnya belum ada indikator yang tepat untuk mengukur kinerja pelaksanaan sertifikasi obat dan makanan dalam rangka pelayanan prima terhadap masyarakat. Setelah dilakukan reviu pada Renstra, didapatkan indikator baru yaitu persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dianggap dapat mengukur kinerja Balai Besar POM di Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko.

12. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 19. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	48	48	60,66	126,37	Tidak Dapat Disimpulkan

Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT.

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

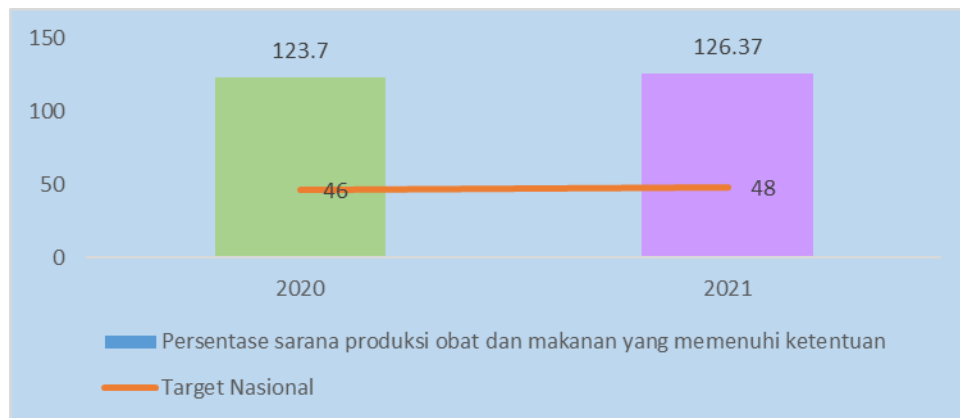
Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Persentase} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritas berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan. Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020.



Gambar 13. Perbandingan persentase realisasi dan capaian sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Capaian TW 1 tahun 2021 **lebih tinggi** dibandingkan tahun 2020 dengan kriteria sama-sama “tidak dapat disimpulkan” walaupun dengan peningkatan target kinerja.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 60,66% **sudah melebihi target** yang ditentukan. Hasil pemeriksaan sarana produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 20. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	1	0	1
2.	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	1	0	1
3.	Industri Obat Tradisional (IOT)	1	0	1
4.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
5.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	7	6	1
6.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0
7.	Industri Farmasi (IF) yang	0	0	0

NO	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
	memproduksi Suplemen Kesehatan			
8.	Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
9.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
10.	Industri Kosmetik	8	6	2
11.	Industri Pangan	23	16	7
12.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	20	9	11
TOTAL		61	37	24

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Dari uraian capaian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian memenuhi ketentuan yang rendah banyak pada UMKM yaitu Industri Rumah Tangga Pangan.
2. Rendahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi cara produksi yang baik dan menerapkan cara produksi yang baik pada sarana produksinya.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam mengatasi masih rendahnya sarana yang memenuhi ketentuan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan dan UMKM Pangan sehingga konsisten dalam penerapan cara produksi yang baik.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Belum adanya form pemeriksaan khusus untuk UMKM dan form pemeriksaan sarana produksi pangan sama untuk semua jenis kategori pangan sehingga menyulitkan pemenuhan untuk sarana UMKM. Telah ada solusi dan inovasi dari Direktorat Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang untuk membuat form 62 untuk UMKM akan tetapi form ini belum dapat diimplementasikan karena belum final dan belum disahkan.
- ✓ Kemampuan Sumberdaya dalam jumlah dan kualitas pembinaan oleh Lintas Sektor terkait masih terbatas dan bervariasi dari setiap wilayah.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan tahun selanjutnya:

1. Peningkatan kompetensi petugas Pembina Industri Rumah Tangga Pangan pada suku Dinas Kesehatan di 6 wilayah DKI Jakarta sehingga akan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap sarana Industri Rumah Tangga Pangan dengan sendirinya akan menurunkan sarana yang tidak memenuhi ketentuan.
2. Pelatihan aspek GMP misal pelatihan CPOB, FI Dasar dll untuk petugas Balai untuk meningkatkan kompetensi dan keseragaman petugas

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di triwulan 1 tahun 2021, capaian lebih dari target yang ditetapkan, tetapi kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Sehingga dengan hasil ini bisa belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja dan menunggu data Triwulan berikutnya.

13. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 21. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	57	57	86,94	152,53	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

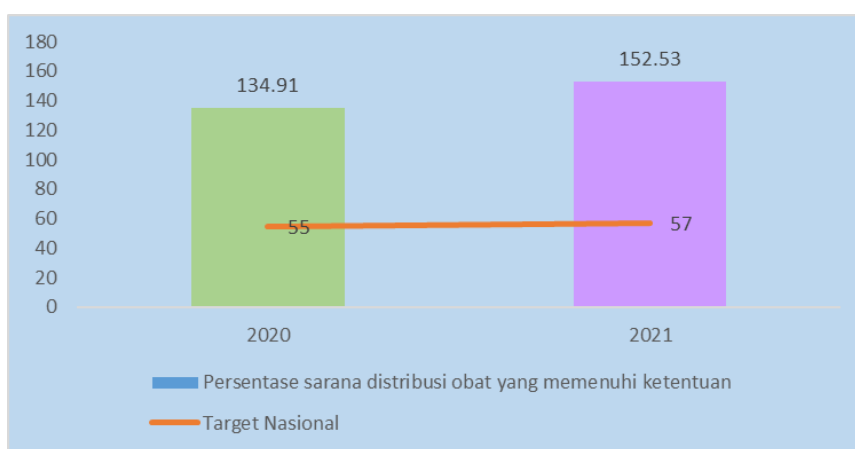
Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- (1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- (2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
- (3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 57% dengan kriteria “Baik”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 58,73 % sarana distribusi obat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan POM.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020.



Gambar 14. Perbandingan realisasi dan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Penetapan definisi operasional baru sesuai Reviu Renstra 2020-2024 tentang kriteria memenuhi ketentuan pada pemeriksaan sarana distribusi obat menyebabkan realisasi TW 1 tahun 2021 **lebih dari target yang ditetapkan**, sama seperti juga hasil tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta **berhasil meningkatkan** persentase pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sehingga melebihi target nasional. Tetapi dari hasil kriteria Tidak Dapat Disimpulkan berarti data masih menunggu hasil capaian Triwulan berikutnya.

- c. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat, obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan Tahun 2021 Triwulan I di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

NO	SARANA DISTRIBUSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	18	11	7
2.	Apotek	24	17	7
3.	Toko Obat	1	1	0
4.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	9	7	2
5.	Rumah Sakit (RS)	5	5	0
6.	Puskemas	80	79	1
7.	Klinik	8	6	2
8.	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0
9.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	55	49	6
10.	Fasilitas Distribusi Suplemen	5	4	1
11.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	64	59	5
12.	Fasilitas Distribusi Pangan	68	55	13
TOTAL		337	293	44

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
- Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk lebih meningkatkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan:

- a. Peningkatan pembinaan terhadap sarana distribusi yang ada dan menerapkan sanksi yang lebih tegas seperti jika masih ditemukan produk tanpa izin edar diberikan sanksi Peringatan Keras dan produk dimusnahkan
- b. Membuat suatu Progran dan Kegiatan Forum KOMunikasi untuk Pemenuhan Cara Distribui yang Baik dan Peenuhan Peraturan Perundanf-undangan yang berlaku. Forum KOMunikasi ini menggunakan Media Sosial yang ada.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta ketika dengan masih adanya Sarana yang belum memenuhi Ketentuan:

- ✓ Masih ditemukan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang melakukan distribusi dan pengadaan obat antar apotek, misalnya jaringan apotek Gita Farma.
- ✓ Belum meratanya pengetahuan pelaku usaha terkait peraturan yang berlaku

Usulan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya:

1. Memaksimalkan penerapan system online yang ada sehingga kendala Sumber Daya dapat diatasi.
2. Evaluasi lebih konsisten setiap bulan dan tindakan perbaikan dan kegiatan pencegahan terhadap pencapaian *output*.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis secara Berkala kepada pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan

d. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain Pengelolaan dan Pendistribusian Vaksin. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.
- Sistem dalam penetapan target pemeriksaan yang lebih tepat dengan menggempur pendistribusian dari sarana legal ke sarana illegal.
- Adanya Kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha baik itu terhadap Cara Ritel yang Baik, ketentuan pemenuhan Penandaan , label dan iklan secara berkala /
- Adanya pengawasan premarket untuk importir kosmetika sehingga pemenuhan cara distribusi yang baik lebih konsisten karena diawal sebelum pelaku usaha memperoleh nomor notifikasi baik untuk importir maupun untuk pemberi kontrak produksi dilakukan pemeriksaan kesipan sarana dan dari awal sudah diberi tahu rambu-rambu sesuai peraturan yang berlaku yang harus dipenuhi

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di

triwulan 1 tahun 2021, capaian lebih dari target yang ditetapkan, tetapi kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Sehingga dengan hasil ini bisa belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja dan menunggu data Triwulan berikutnya.

14. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 23. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta	3.76	-	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) *Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);*
- 2) *Profesionalitas SDM (18%);*
- 3) *Sarana Prasarana (15%);*
- 4) *Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);*
- 5) *Konsultasi dan Pengaduan (15%);*
- 6) *Inovasi (7%).*

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM, dengan kategori nilai sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk

Range Nilai	Kategori	Makna
2,01 – 2,50	C-	Cukup (dengan catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (dengan catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	B	Pelayanan Prima

Hasil penilaian UPP BPOM akan dilakukan pada akhir tahun 2021, sehingga pada triwulan I tahun 2021 ini belum ada realisasi dan capaian.

b. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) BBPOM di Jakarta tahun 2020 diperoleh sebesar 4.00 (B/ Baik) dengan kriteria sangat baik.

Target Indeks Pelayanan Publik (IPP) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) BBPOM di Jakarta tahun 2021 adalah 3.76. Adapun beberapa kelemahan dan rekomendasi terkait penilaian indeks pelayanan publik tahun 2020 ini meliputi:

- **Aspek Kebijakan Pelayanan**

Kelemahan pada aspek ini meliputi masih digunakannya PerBPOM No 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM yang belum mencakup komponen jumlah pelaksana dan kecepatan tindak lanjut hasil SKM.

Rekomendasi yang terkait meliputi monev terhadap Standar Pelayanan, pemanfaatan masukan hasil monev pengaduan masyarakat dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik dan pemasangan Standar Pelayanan Publik yang dapat dibaca dengan mudah di ruang pelayanan berupa leaflet/banner, media cetak dan *website*.

- Aspek Profesionalisme SDM

Rekomendasi yang terkait aspek ini meliputi implementasi penggunaan atribut berupa PIN/logo Unit Pelayanan serta profil pelaksana yang dipublikasi di ruang pelayanan dan data dukung penerapan kode etik pelayanan dan penerapan sanksi yang telah ditetapkan.

- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik

Rekomendasi berupa *subsite* UPP BPOM dilengkapi dengan unsur profil penyelenggara, pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan dan penilaian kinerja lembaga serta data sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik berupa sistem data informasi pelayanan yang mengacu *subsite*, aplikasi proses bisnis mengacu qms.pom.go.id, sistem pengelolaan pengaduan mengacu Simpel LPK, SKM mengacu Simolekdesi, dan SDM mengacu SIASN.

- Aspek Konsultasi dan Pengaduan

Rekomendasi berupa penambahan data dukung dokumen/arsip untuk tamu yang datang langsung serta rekapitulasi hasil pengaduan sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

- Aspek Inovasi

Rekomendasi berupa implementasi inovasi secara terus-menerus dan monev berkelanjutan untuk menilai dampaknya terhadap masyarakat dan selanjutnya dapat direplikasi serta diikutsertakan dalam Kompetisi Pelayanan Publik dan/ atau penghargaan lainnya.

$$NPS = \frac{109,20 + 139,27 + 95,69 + 126,37 + 152,53}{5} + NPI6$$

6

Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

15. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 24. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN ITAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN ITAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	90.99	90.99	-	-	-

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media social

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survei. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Adapun hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE dikategorikan sebagai berikut:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01-75,00	Cukup Eektif
75,01-85,00	Efektif
85,01-95,00	Sangat Efektif
95,01-100	Sangat Efektif Sekali

Indikator tingkat efektivitas KIE obat dan makanan di wilayah BBPOM di Jakarta diukur melalui survei sepanjang periode Triwulan I tahun 2021. Realisasi dan capaian akan tersedia bila penarikan dan pengolahan data hasil survei telah selesai dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi Badan POM.

b. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sampai dengan Triwulan IV tahun 2020 ialah sebesar 93.02, yang menandakan bahwa kegiatan KIE Obat dan Makanan yang dilakukan melalui berbagai media Sangat Efektif. Media KIE Obat dan Makanan yang termasuk dalam survei terdiri atas berbagai macam media cetak maupun elektronik, seperti brosur, majalah, koran, televisi, media online, CFD, pameran, penyuluhan, media sosial, virtual, dan talkshow.

Target Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 adalah 90.99. Sebagai tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja ialah meningkatkan koordinasi dan engagement dengan responden KIE sehingga metode KIE yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan keterlibatan responden dalam survei. Variasi konten KIE juga dapat dilakukan guna meningkatkan pemahaman, minat, dan manfaat bagi responden. Selain itu, tindak lanjut berupa monitoring untuk memastikan tidak ada duplikasi data responden perlu dilakukan.

16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 25. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	40	20%	20%	100.00%	Baik

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS,

sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Realisasi bulanan dan triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	20%	Februari-April (TW 1-TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	5%	Februari-Juni (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 1-TW 2)
4	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah - Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah (5%) - Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah (10%)	15%	Juli-September (TW 3)
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15%	Oktober-Desember (TW 4)
7	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 2	20%	Oktober-Desember (TW 4)
Total Skor		100%	

Realisasi *progress* tahapan intervensi keamanan PJAS pada Triwulan I tahun 2021 ialah sebesar 20% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 26 Maret 2021. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi keamanan PJAS telah mencapai target Triwulan I yaitu 20% dengan kriteria Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan capaian program intervensi PJAS pada Triwulan I ini yaitu adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dengan adanya sinergisme dan dukungan ini, penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan sekolah intervensi PJAS mengenai pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah serta intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah oleh kader dilakukan melalui media *Whatsapp* dan *Zoom Meeting* sehingga informasi dan respon dapat diberikan dan diterima secara cepat. Selain itu, koordinasi melalui komunikasi yang efektif ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan program intervensi PJAS.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Target intervensi PJAS pada tahun 2021 ini ialah 40 sekolah. Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan

perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor dan sekolah target, contohnya komunikasi efektif melalui forum komunikasi via *Whatsapp* dan pertemuan diskusi baik secara tatap muka maupun secara daring via *Zoom*.

17. Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 26. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai besar POM di Jakarta	14	25%	25%	100%	Baik

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang menjadi sasaran intervensi dapat terdiri dari desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan $IDM > 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan $IDM > 0.599$ dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi

Desa pangan aman ditentukan dari kriteria:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,

- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Jumlah desa/ kelurahan yang diintervensi tahun 2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta ialah 14 kelurahan yang meliputi 9 kelurahan intervensi baru dan 5 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020.

Realisasi bulanan dan triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)
2	Pengadaan paket informasi keamanan pangan, <i>rapid test</i> , dll.	5%	Januari-April (TW 1-TW 2)
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15%	April-Juli (TW 2-TW 3)
4	Bimtek Komunitas, sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15%	Mei-Oktober (TW 2-TW 4)
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	10%	Juni-November (TW 2-TW 4)
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10%	-Pre Intervensi: Mei-Oktober (dapat dilakukan bersamaan dengan bimtek komunitas) -Post Intervensi: November (dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data/survei post intervensi)
7	Monitoring dan Evaluasi	15%	November-Desember (TW 4)

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
8	Pengawalan	10%	Juni-Desember (TW 2-TW 4)
Total Skor		100%	

Realisasi *progress* tahapan intervensi Desa Pangan Aman pada Triwulan I tahun 2021 ialah sebesar 25% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 26 Maret 2021 serta telah diadakannya paket informasi keamanan pangan, *rapid test*, dll. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa Pangan Aman telah mencapai target Triwulan I yaitu 25% dengan kriteria Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi *progress* tahapan program Desa Pangan Aman pada Triwulan I ialah 25%. Penyebab keberhasilan capaian program Desa Pangan Aman pada Triwulan I ini yaitu adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Dengan adanya sinergisme dan dukungan ini, penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor kelurahan melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

d. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Target intervensi program Desa Pangan Aman pada tahun 2021 ini ialah 14 kelurahan yang terdiri atas 9 kelurahan intervensi baru dan 5 kelurahan pengawalan dari intervensi tahun 2020. Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan lintas sektor kelurahan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program Desa Pangan Aman tahun 2020 dapat dijabarkan faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program sebagai berikut:

1) Faktor pendukung Program GKPD

- a) Komitmen Lurah beserta Tim Keamanan Pangan Desa untuk melaksanakan program keamanan pangan secara berkelanjutan.
- b) Kader Keamanan Pangan Desa yang aktif melakukan pendampingan implementasi keamanan pangan kepada komunitas desa/kelurahan dan pengawasan keamanan pangan di desa/kelurahan.
- c) Adanya dukungan OPD terkait terhadap pelaksanaan program keamanan pangan di desa/kelurahan.
- d) Tersusunnya dokumen rencana program keamanan pangan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
- e) Adanya peningkatan komunitas usaha pangan desa/kelurahan dengan pemberian SPPIRT oleh Sudinkes.

2) Faktor penghambat Program GKPD

- a) Koordinasi antara Tim Keamanan Pangan Desa dan Kader Keamanan Pangan Desa perlu ditingkatkan.

- b) Sistem pertemuan dan bimtek yang dilakukan secara *daring*, sehingga peserta yang mengikuti kurang fokus dan materi kurang dapat dipahami dengan baik.
- c) Adanya kondisi Pandemi Covid 19 yang membatasi kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan yang membutuhkan interaksi tatap muka, sehingga pendampingan implementasi keamanan pangan oleh komunitas belum tercapai secara optimal.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Desa Pangan Aman tahun 2021, dapat dilakukan berbagai upaya optimalisasi faktor-faktor pendukung dan minimalisasi faktor penghambat yang telah disebutkan di atas, salah satunya dengan cara intensifikasi koordinasi melalui forum komunikasi dengan kelurahan intervensi dan OPD terkait yang dapat dilakukan dengan *Whatsapp* dan diskusi pembahasan program baik secara tatap muka maupun daring melalui *Zoom*.

18. Jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 27. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	2	25%	25%	100.00%	Baik

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye

pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya,
- 2) Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Jumlah pasar yang diintervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta ialah 2 (satu) pasar yaitu 1 pasar intervensi baru dan 1 pasar pengawalan intervensi tahun 2020. Realisasi bulanan dan triwulan dihitung berdasarkan *progress* tahapan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi	20%	Januari-April (TW 1-TW 2)

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Survei Pasar	5%	Januari (TW 1)
2	Bimtek Pengelola Pasar + Materi Pelatihan Fasilitator	15%	April-Mei (TW 2)
3	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20%	April (TW 2)
4	Penyuluhan	5%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
6	Kampanye	5%	Juni-Juli (TW 2-TW 3)
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20%	September-Oktober (TW 3-4)
8	Lomba Pasar Aman	10%	Desember (TW 4)
	Total Skor		

Realisasi *progress* tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan I tahun 2021 ialah sebesar 25% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Desa Pangan Aman pada 26 Maret 2021 serta telah terselenggaranya Survei Pasar pada 24 Maret 2021 ke pasar intervensi yaitu Pasar Gembrong Baru. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah mencapai target Triwulan I yaitu 25% dengan kriteria Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan tahapan kegiatan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas ini sudah sesuai *timeline* yang ditetapkan. Kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya kegiatan sesuai rencana. Selain itu, dengan adanya

komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

c. *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja*

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media *Whatsapp* sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

d. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Target intervensi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2021 ini adalah 2 pasar meliputi 1 pasar intervensi baru dan 1 pasar pengawalan intervensi tahun 2020. Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan pengelola pasar target, contohnya komunikasi efektif melalui forum komunikasi via *Whatsapp* dan pertemuan diskusi baik secara tatap muka maupun secara daring via *Zoom*

$$NPS = \frac{NPI + 100 + 100 + 100}{3}$$

3

Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 28. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90.5	14	10.36	74.0	Cukup

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan

Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling*. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka.

Sesuai standar adalah standar pedoman *sampling* dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/ *SOP*

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta selama triwulan I yaitu 74% dengan kriteria **“Cukup”**. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Jakarta cukup berhasil memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020

Pada Triwulan I Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2020 karena pelaksanaan kegiatan baru berlangsung sampai TW I.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2021 Triwulan I adalah 10.36%, masih kurang dari target yang ditetapkan (14 %) dikarenakan sampel di TW I baru sampai pada tahap pengujian akhir maret dan sebagian baru dapat di laporkan di bulan April 2021.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:
- Menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- Melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat.
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan

untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.

- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya adalah, telah dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten

20. **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 29. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89.5	14	10.77	76.93	Baik

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman *sampling* dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian di laboratorium.

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$

Capaian persentase pemenuhan pengujian makanan sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta Triwulan I yaitu 79.93% dengan kriteria **“Cukup”**. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Jakarta memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM yaitu memenuhi parameter kritis dan memenuhi *timeline*.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2021 dengan tahun 2020

Pada Triwulan I Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2020 karena pelaksanaan kegiatan baru berlangsung sampai TW I

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2021 Triwulan I adalah 10.77%, masih kurang dari target yang ditetapkan (14 %) dikarenakan sampel di TW I baru sampai pada tahap pengujian akhir maret dan sebagian baru dapat di laporkan di bulan April 2021.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji

yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis dari laboratorium Pangan

- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian.

e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya*

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya adalah, telah dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2}{2}$$

2

$$NPS = \frac{74 + 76,93}{2}$$

Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

21. Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. *Perbandingan target dan realisasi Triwulan I Tahun 2021*

Tabel 30. Realisasi Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	40	10	10,74	107,37	Baik

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30% -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[d / \text{jumlah perkara}]$

Nilai Tingkat Keberhasilan:

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta periode triwulan pertama atau Januari – Maret 2021 adalah **mencapai target** yang ditetapkan yakni tingkat keberhasilan **10,74** dari target tingkat keberhasilan di triwulan pertama 2021 sebesar **10,00** dengan kriteria "**baik**". Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada triwulan pertama atau periode Januari – Maret 2021, Kelompok Substansi Penindakan

BBPOM di Jakarta **telah berhasil** memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan

b. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2021 dan 2020 adalah terdapat peningkatan capaian dari 99,25% di tahun 2020 menjadi 107,37% di tahun 2021. Terdapat peningkatan kinerja sebesar 8,12% pada periode yang sama. Peningkatan kinerja ini sebagai hasil dari proses penyidikan mulai dari SPDP tahun 2021 hingga berkas perkara tahun 2020 yang dinyatakan lengkap (P21) di tahun 2021.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis terhadap tingkat keberhasilan Bidang Penindakan BBPOM di Jakarta dalam mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan *spreadsheet* yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja. *Spreadsheet* ini dijalankan sejak penerapan kerja WFH WFO hingga saat ini. Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi.

2. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) Perubahan besar yang terjadi dengan diberlakukannya UU RI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan perubahan paradigma penindakan. Selain itu, masih masifnya peredaran obat dan makanan secara daring/elektronik juga terus menimbulkan tantangan baru bagi kinerja penindakan. Keterbatasan kewenangan dan kemampuan petugas BBPOM di Jakarta diatasi dengan menjalin

3. kerja sama dengan lintas sektor terkait yakni Deputy Kelompok Substansi Penindakan BPOM, Polda Metro Jaya, kurir pengiriman dan pengelola *marketplace*. Pada triwulan pertama, kegiatan penelusuran dan

pendalaman informasi peredaran obat dan makanan ilegal melalui situs daring/elektronik yang melibatkan kerja sama dengan lintas sektor terkait dapat menghasilkan temuan yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi penindakan. Namun dengan perubahan peraturan, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap target dan indikator kinerja penindakan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sepanjang triwulan pertama ini, kombinasi dari kegiatan intelijen dan patroli siber masih menjadi kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Dua kegiatan penindakan yang dilaksanakan merupakan hasil dari pendalaman informasi dari kegiatan intelijen dan patroli siber tersebut. Kerja sama dengan pengelola *marketplace* juga terus dibina sehingga upaya penelusuran dan pendalaman informasi mendapatkan hasil yang valid dan optimal.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM merupakan kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

e. Analisis terhadap penggunaan sumber daya

Pada periode triwulan pertama tahun 2020, hasil penilaian tingkat efisiensi anggaran di Kelompok Substansi Penindakan adalah sebesar **26,18** atau capaian masuk ke dalam kategori **efisien (75%)**. Capaian ini merupakan gambaran dari penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai target kinerja tahun 2021.

Pada triwulan pertama, penggunaan anggaran untuk output perkara di bidang obat dan makanan sebesar Rp 69.466.369 dari total anggaran RP 1.156.920.000 sementara dari output laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan belum ada penyerapan anggaran. Realisasi penggunaan anggaran sebesar 6% dari total anggaran Rp 1.758.622.000. Penggunaan sumber daya pada triwulan berikutnya perlu ditingkatkan efisiensinya sesuai

dengan perencanaan yang telah disusun untuk mendukung pencapaian target kinerja.

f. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pencapaian triwulan pertama ini merupakan upaya penerapan rekomendasi perbaikan kinerja di tahun 2020. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan bahwa peningkatan efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan merupakan hasil dari upaya komprehensif kegiatan intelijen hingga penyidikan perkara. Terlepas dari dinamika yang terjadi khususnya dalam perubahan struktur organisasi pada Deputy Bidang Penindakan BPOM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya penyesuaian dan peningkatan kompetensi personel kelompok substansi penindakan terus dilakukan.

Kegiatan yang dapat menunjang untuk mencapai target kinerja yang belum terlaksana di triwulan pertama akan disiapkan untuk dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam dokumen *Plan of Action* 2021.

Sasaran Strategis-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Jakarta yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

22. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 31. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	90	-	-	-	-

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	5%
2	Penataan Tatalaksana	5%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Hasil	Bobot (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Nilai indeks dihitung dari Penjumlahan bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil. Penilaian indeks RB dilakukan oleh Inspektorat Utama, dan indeks RB Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2021 adalah 80,17, meskipun masih di bawah target tetapi telah memenuhi kriteria Baik. Hal tersebut juga didukung dengan terpilihnya Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu instansi berpredikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2021.

23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 32. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	85	-	-	-	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pengukuran (5%)
 - b. Kualitas pengukuran (12,5%)
 - c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan pelaporan (3%)
 - b. Kualitas pelaporan (7,5%)
 - c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:

- a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
- a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%)

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 33. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Rentang nilai evaluasi AKIP pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- (2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- (3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- (4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70

- (5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- (6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- (7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-3.

Capaian Nilai AKIP BBPOM di Jakarta pada Triwulan Itahun 2021 belum tersedia karena hasil penilaian oleh APIP baru akan diterima pada akhir tahun 2021.

b. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pada tahun 2019, BBPOM di Jakarta mendapatkan nilai AKIP BB. Untuk mencapai target nilai A pada tahun 2021. Rencana aksi yang telah dilakukan pada Triwulan I antara lain : penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Renstra, menyusun SKP secara cascading dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga ke individu, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, penyusunan draft Renstra 2021-2024, pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang telah dikembangkan yang berdasarkan *Balance Score Card*. Pengukuran kinerja *cascading* dari pejabat eselon 2 di BBPOM di Jakarta telah dilakukan hingga pejabat eselon 3 dan 4. Aplikasi *e-performance* juga telah diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP yang merupakan pengukuran kinerja individu. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun 2019 juga telah disusun laporan kinerja interim triwulan II.

$$NPS = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

2

Sasaran Strategis-9: Terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

24. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 34. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	77	-	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Penilaian indeks RB dilakukan oleh Inspektorat Utama, dan indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 adalah 83,94 telah melampau target yang ditetapkan 75, dengan nilai pencapaian sasaran 111,92 dengan kriteria “Sangat Baik”

Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Pada Triwulan I belum dilakukan Assasment GLP oleh P3OMN sehingga realisasinya belum ada.

26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 35. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal	2	2	-	-	-

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di *BCC (BPOM Command Centre)*

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem *BCC* yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.

Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem *BCC* yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

(1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan

(2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

Balai: *email, sharing folder, dashboard* BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai

Pusat: *email dan dashboard* BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

- b. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Data capaian belum dapat dihitung dikarenakan belum tersedianya data capaian dari Badan POM per tanggal 20 April 2021 pukul 10.00 WIB.

$$NPS = \frac{NPI1 + NPI2}{2}$$

2

$$NPS = NPA$$

Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

27. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021

Tabel 36. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021	KRITERIA
Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta	90,50	14			

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- (1) Revisi DIPA
- (2) Deviasi Halaman III DIPA
- (3) Pengelolaan UP
- (4) Rekon LPJ Bendahara
- (5) Data Kontrak
- (6) Penyelesaian Tagihan
- (7) Penyerapan Anggaran
- (8) Retur SP2D
- (9) Perencanaan Kas (Renkas)

Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta dihitung menggunakan rumus : $(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$

Pada Triwulan 1 Tahun 2021, nilai IKPA BBPOM di Jakarta 93,77. Sesuai dengan PER-4/PB/2021, untuk Periode Triwulan I Tahun 2021, tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Halaman III DIPA dan Capaian Output. Sedangkan nilai EKA belum diperoleh sehingga Nilai Kinerja Anggaran belum dapat ditentukan dan dianalisis

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai IKPA yang diperoleh pada Triwulan 1 ini menyumbang nilai sebesar 37,508 untuk nilai kinerja anggaran. Nilai EKA tidak diperoleh karena untuk saat ini, web MonevDJA hanya menampilkan indikator capaian output. Indikator Capaian Output Januari sampai dengan Maret 2021 telah diisikan pada Monev DJA.

c. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Rekomendasi terkait nilai kinerja anggaran telah diterapkan dan terus diupayakan untuk ditingkatkan Balai Besar POM di Jakarta. Kerjasama untuk konsisten dalam melaksanakan anggaran sesuai rencana penarikan terus dilakukan. Selain itu, telah dilakukan koordinasi untuk kontrak agar data dapat dilaporkan sesuai ketentuan. Monitoring terhadap anggaran yang diterapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di akhir tahun 2021.

28. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2021*

Tabel 36. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021

INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET TRIWULAN I TAHUN 2021	REALISASI	CAPAIAN TRIWULAN I TAHUN 2021 (%)	KRITERIA
Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Tidak Efisien (75%)	79%	Cukup

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari capaian *input*. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian *output* dengan % capaian *input*, dengan rumus sebagai berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1; Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien, dengan kriteria:

- (1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- (2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian ITE dihitung dengan jangkauan sebagai berikut:

- (1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- (2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- (3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- (4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- (5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)

(6) 1,01 - 1,2	: 86% (Tidak Efisien)
(7) 1,21 - 1,4	: 84% (Tidak Efisien)
(8) 1,41 - 1,6	: 80% (Tidak Efisien)
(9) 1,61 - 1,8	: 78% (Tidak Efisien)
(10) > 1,81	: 75% (Tidak Efisien)
(11) < 0	: 75% (Tidak Efisien)

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Triwulan 1 Tahun 2021 sebesar 75%, belum mencapai target yang ditetapkan. Capaian tingkat efisiensi anggaran sebesar 79% dari target.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya nilai tingkat efisiensi anggaran, antara lain sebagian kegiatan masih dalam tahap perencanaan karena masih pada awal tahun.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Selama masa pandemi COVID-19, Balai Besar POM di Jakarta berupaya tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Adaptasi pola pelaksanaan sebagian besar kegiatan menjadi daring. Antisipasi perubahan kondisi selama masa pandemi COVID-19 yang bertumpu pada kegiatan daring berdampak positif pada pencapaian *output*. Dengan demikian, penggunaan anggaran menjadi tetap efisien dan kinerja tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Triwulan I sesuai dengan target yang diharapkan.

3.1. Realisasi Anggaran

Pagu DIPA BBPOM di Jakarta sebesar Rp. 47.430.798.000,00. Realisasi anggaran pada Triwulan 1 tahun 2021 sebesar Rp. 7.064.316.595 atau 14,89%. Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Jakarta senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan I tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian input
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1.458.734.200	113.757.184	7,79%
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	189.354.990	16.170.000	8,53%
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	2.570.416.290	20.985.229	0,81%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1.489.531.220	68.871.060	4,62%
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	3.530.366.000	888.191.200	25,15%

No	Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian input
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	625.171.800	48.220.249	7,71%
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	1.758.622.000	69.466.349	3,95%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	950.840.500	96.398.325	10,13%
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	24.573.416.000	5.318.085.858	21,64%
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	9.333.504.500	327.772.816	3,51%
11	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	950.840.500	96.398.325	10,13%

- Rendahnya capaian anggaran di sasaran 3 “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” merupakan salah satu dampak dari Pandemi Covid 19 . Pemerintah melakukan antisipasi antara lain dengan melakukan pembatasan sosial yang diantaranya dilakukan melalui mekanisme *Work From Home (WFH)* sehingga beberapa kegiatan dilakukan secara daring dan berdampak terhadap penyerapan anggaran yang lebih rendah.

3.2. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka
kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan
dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = IE - SE$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2021 Triwulan I sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 38. Tingkat Efisiensi Kegiatan Triwulan I tahun 2021

Kode	Program/Output/Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
3165.ADD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	7.95	25	3.14	1	2.14	Efisien
3165.AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	0	0	-	1	-	-
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	2.56	100	39.06	1	38.06	Efisien
3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BB/BPOM	37.06	56.6	1.53	1	0.53	Efisien
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	9.06	25	2.76	1	1.76	Efisien
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	0	3.85	-	1	-	-
3165.CAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0	25	-	1	-	-
3165.CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0	25	-	1	-	-
3165.CAB.003	Layanan Prasarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	25	-	1	-	-
3165.QCD.U01	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI/ BALAI BESAR POM	6	13.33	2.22	1	1.22	Efisien
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	14.68	20	1.36	1	0.36	Efisien
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	0	25	-	1	-	-
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	8.76	25	2.85	1	1.85	Efisien
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	7.75	12.51	1.61	1	0.61	Efisien
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	8.07	10.36	1.28	1	0.28	Efisien

Kode	Program/Output/Kegiatan	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BB/BPOM	5.52	35	6.34	1	5.34	Efisien
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	1.63	18.32	11.24	1	10.24	Efisien
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	3.5	29	8.29	1	7.29	Efisien
6348.EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	18.54	25	1.35	1	0.35	Efisien

Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan 19 (Sembilan belas) kegiatan untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan kategori efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,28 sampai 38,06. Dalam hal ini, semakin rendah TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. “Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM” mempunyai TE tertinggi karena *output* yang diperoleh paling tinggi dibandingkan kegiatan lain. Capaian *output* mencapai 100% dengan *input* hanya sebesar 2,56%. Tingginya efisiensi *output* karena *output* dihitung dari jenis layanan yang telah diberikan, dan sampai Triwulan 1, semua jenis layanan telah diberikan. Namun Layanan akan tetap diberikan sampai akhir tahun karena layanan diberikan berdasarkan permohonan yang masuk (faktor eksternal).

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 39. Efisiensi kegiatan Per Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

No	Sasaran Strategis	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	7.79	102.8	13.20	1	12.20	Efisien
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	8.53	N/A	-	1	-	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	0.81	N/A	-	1	-	-
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	4.62	75.48	16.34	1	15.34	Efisien
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	25.15	155.56	6.19	1	5.19	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	7.71	109.2	14.16	1	13.16	Efisien
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	3.95	128.642	32.57	1	31.56	Efisien
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	10.13	N/A	-	1	-	-
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	21.64	N/A	-	1	-	-
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	3.51	N/A	-	1	-	-

No	Sasaran Strategis	Persen capaian rata-rata		IE	SE	TE	Kategori
		input	output				
11	Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	10.13	39.47	3.90	1	2.90	Efisien

Beberapa sasaran strategis tidak dapat dihitung nilai tingkat efisiensinya karena terkait data capaian indeks yang ditetapkan oleh Badan POM Pusat. Seluruh sasaran strategis yang dapat diperhitungkan tingkat efisiensinya, memiliki nilai $TE > 1$ dengan kriteria efisien. Nilai efisiensi tertinggi terdapat pada sasaran strategis ketujuh yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”.

Berdasarkan besarnya anggaran untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan (selain gaji) di Balai Besar POM di Jakarta dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Proporsi capaian anggaran tertinggi adalah untuk pencapaian sasaran ke 5 yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”. Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran ke-5 sebesar Rp 888.191.200. atau 25,15% dari keseluruhan realisasi anggaran.
- b. Proporsi capaian anggaran terkecil adalah untuk pencapaian sasaran ketiga “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”. Anggaran yang direalisasikan untuk Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran ke-3 sebesar Rp 20.985.229 atau sebesar 0,81% dari pagu anggaran yang tersedia.

Berdasarkan aplikasi monev.anggaran.kemenkeu.go.id per tanggal 9 April 2021 tidak nampak nilai EKA sehingga nilai kinerja anggaran tidak dapat dihitung.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis 2021-2024. Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis tersebut, diukur melalui 28 indikator kinerja utama.

1. Dari 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, 9 (sembilan) indikator mencapai target dengan kategori “**baik**” ($90\% \leq x < 110\%$); 3 (tiga) indikator mencapai kategori “**cukup**” ($70\% \leq x < 90\%$); 3 (tiga) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori “**tidak dapat disimpulkan**”.
2. Hasil capaian empat sasaran strategis terbaik dari adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai pencapaian pertama adalah pada sasaran strategis ke-empat sebesar 124,61% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, menunjukkan Balai Besar POM di Jakarta telah sangat berhasil dalam melayani masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.
 - b. Nilai pencapaian tertinggi ke-2 adalah pada sasaran strategis ke-tujuh sebesar 107,37% dengan kriteria BAIK menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.
3. Dari 19 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, terdapat 13 kegiatan yang tidak efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,28 hingga 3,86 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BBPOM di Jakarta)

4.2. Saran

1. Hingga Triwulan I tahun 2021, kegiatan banyak terkendala disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang ditindaklanjuti dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerja BBPOM di Jakarta. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan secara daring merupakan pilihan utama selama masa pandemi.
2. Rencana yang ditetapkan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan terus dievaluasi secara konsisten sehingga kinerja yang dilaksanakan dapat memenuhi target di tahun 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan (Kegiatan: Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia)							
	Stakeholder						
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86,5	87	87,5	88
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78,5	79	79,5	80
	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	78	80	83	86

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	84	86	87,5	89
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	75	78	81	84
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90,5	91	91,5	92
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	60,2	70,5	75,5	80
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	48	52	54	56
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	57	59	60	62

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	3,76	4,01	4,26	4,51
	Internal Process						
	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	60	80	102
		Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	1	2	3	4	6
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90,5	91	91,5	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	89,5	90	90,5	91
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	40	49	57	65

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta						
Learning and Growth							
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	90	93	94	95
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	85	90	91	92
	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	77	80	82	85
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	82,5	83	83,5	84
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
	Terkelolanya Keuangan UPT Balai	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	94	95	96	97

Program/ Kegiatan	Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	Efisien (95)	Efisien (95)	Efisien (95)	Efisien (95)	Efisien (95)

Lampiran 2. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengujian Laboratorium Triwulan I tahun 2021

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Januari												Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji							
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluwarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji	TMK Penandaan dan MS Uji	TMK Penandaan dan TMS uji	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	128	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-	-																
			Jakarta	512		Random	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0
			-	-																
			-	-																
			TOTAL	640			20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0
2	Obat Tradisional/	sampel	Jakarta	144	Targeted	9	0	0	0	0	9	6	6	0	0	0	0	0	3	6
			-	-																
			Jakarta	336		Random	20	0	0	0	0	20	15	15	0	0	0	0	5	15
			-	-																
			-	-																
			TOTAL	480			29	0	0	0	0	29	21	21	0	0	0	0	8	21
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	48	Targeted	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0
			-	-																
			Jakarta	112		Random	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0
			-	-																
			-	-																
			TOTAL	160			19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
			-	-																
			Jakarta	671		Random	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0
			-	-																
			-	-																
			TOTAL	959			20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0
	Total Obat			128	Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Obat Tradisional			144		9	0	0	0	0	9	6	6	0	0	0	0	0	3	6
	Total Suplemen Kesehatan			48		9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0
	Total Kosmetik			288		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	Jakarta			608	Targeted	28	0	0	0	0	28	6	6	0	0	0	0	22	6	
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos			608		28	0	0	0	0	28	6	6	0	0	0	0	0	22	6
	Total Obat			512	Random	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	
	Total Obat Tradisional			336		20	0	0	0	0	20	15	15	0	0	0	0	0	5	15
	Total Suplemen Kesehatan			112		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	Total Kosmetik			671		10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0
	Jakarta			1631	Random	60	0	0	0	0	60	15	15	0	0	0	0	45	15	
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos			1631		60	0	0	0	0	60	15	15	0	0	0	0	0	45	15
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2239		88	0	0	0	0	88	21	21	0	0	0	0	67	21	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	160	Targeted	41	2	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	2	39	2
			-	-																
			-	-																
			Jakarta	759		Random	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0
			-	-																
			-	-																
			-	-																
	Total Pangan			160	Targeted	41	2	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	2	39	2
	Total Pangan			759	Random	41	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	
	TOTAL PANGAN			919		82	2	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	2	80	2
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	0	120	Targeted	40	2	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	2	38	2
			Jakarta	0																
			-	0																
			-	0																
			0	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted		0	0																
	Total Obat		0	0																
			0	0																
	Total Pangan			120	Targeted	40	2	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	2	38	2
	Total Pangan			0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PANGAN FORTIFIKASI			120		40	2	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	2	38	2

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Februari														Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji									
							TIE/Illegal/Palsu	kedalu arsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)					
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																						
1	Obat	sampel	Jakarta	128	Targeted	4	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
			-									0	0						0	0	0	
			Jakarta	512								0	0						0	0	0	
			-									0	0						0	0	0	
			-		Random						0	0							0	0	0	
			Jakarta	512			0	0	0	0	56	29	25	0	4	0	0	0	4	27	29	
			-									0	0						0	0	0	
			-									0	0						0	0	0	
			TOTAL	640		40	0	0	0	1	60	29	25	0	4	0	0	0	4	31	29	
2	Obat Tradisional/	sampel	Jakarta	144	Targeted	22	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	
			-									0	0						0	0	0	
			Jakarta	336								0	0						0	0	0	
			-									0	0						0	0	0	
			-		Random						0	0							0	0	0	
			Jakarta	336			38	2	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	2	41	2	
			-									0	0						0	0	0	
			-									0	0						0	0	0	
			TOTAL	480		60	2	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	2	66	2	
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	48	Targeted	5	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	
			-									0	0						0	0	0	
			Jakarta	112								0	0						0	0	0	
			-									0	0						0	0	0	
			-		Random						0	0							0	0	0	
			Jakarta	112			20	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	
			-									0	0						0	0	0	
			-									0	0						0	0	0	
			TOTAL	160		25	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	44	0		
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	30	0	0	0	0	40	10	10	0	0	0	0	0	0	30	10	
			-									0	0						0	0	0	
			Jakarta	671								0	0						0	0	0	
			-									0	0						0	0	0	
			-		Random						0	0							0	0	0	
			Jakarta	671			72	0	0	0	0	82	9	6	0	3	0	0	3	73	9	
			-									0	0						0	0	0	
			-									0	0						0	0	0	
			TOTAL	959		102	0	0	0	0	122	19	16	0	3	0	0	3	103	19		
			Total Obat	128	Targeted	4	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0		
			Total Obat Tradisional	144			22	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0		
			Total Suplemen Kesehatan	48			5	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0		
			Total Kosmetik	288			30	0	0	0	0	40	10	10	0	0	0	0	30	10		
			Jakarta	608	Targeted	61	0	0	0	1	83	10	10	0	0	0	0	0	73	10		
			-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos	608			61	0	0	0	1	83	10	10	0	0	0	0	73	10		
			Total Obat	512	Random	36	0	0	0	0	56	29	25	0	4	0	0	4	27	29		
			Total Obat Tradisional	336			38	2	0	0	0	41	0	0	0	0	0	2	41	2		
			Total Suplemen Kesehatan	112			20	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0		
			Total Kosmetik	671			72	0	0	0	0	82	9	6	0	3	0	0	3	73	9	
			Jakarta	1631	Random	166	2	0	0	0	209	38	31	0	7	0	0	9	171	40		
			-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			-				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Total Random Obat, OT, Sk dan Kos	1631			166	2	0	0	0	209	38	31	0	7	0	0	9	171	40	
			TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	2239		227	2	0	0	1	292	48	41	0	7	0	0	9	244	50		
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																						
1	Pangan	sampel	Jakarta	160	Targeted	12	0	0	0	0	51	40	32	6	2	0	0	8	11	40		
	0	0	-				0					0	0					0	0	0		
	0	0	-				0					0	0					0	0	0		
	0	0	Jakarta	759			89	0	0	0	3	130	0	0	0	0	0	0	130	0		
	0	0	-		Random						0	0						0	0	0		
	0	0	-									0	0						0	0	0	
	0	0	-									0	0						0	0	0	
			-									0	0						0	0	0	
			Total Pangan	160	Targeted	12	0	0	0	0	51	40	32	6	2	0	0	8	11	40		
			Total Pangan	759	Random	89	0	0	0	3	130	0	0	0	0	0	0	0	130	0		
			TOTAL PANGAN	919		101	0	0	0	3	181	40	32	6	2	0	0	8	141	40		
Sampel Makanan FORTIFIKASI																						
1	Pangan	sampel	0	120	Targeted	10	0	0	0	0	48	40	32	6	2	0	0	8	8	40		
	Jakarta	0	0				0					0	0					0	0	0		
	-	0	0				0					0	0					0	0	0		
	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0					0	0	0		
	Total targeted	0	0		Random	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0		
	0	0	0				0					0	0						0	0	0	
	Total Obat	0	0				0					0	0						0	0	0	
			0				0					0	0						0	0	0	
			Total Pangan	120	Targeted	10	0	0	0	0	48	40	32	6	2	0	0	8	8	40		
			Total Pangan	0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TOTAL PANGAN FORTIFIKASI	120		10	0	0	0	0	48	40	32	6	2	0	0	8	8	40		

No	Jenis Produk	Satuan	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Maret												Total TMS yang diperik sa	Belum selesai uji	Perhitu ngen Output DJA
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penan daan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji TMS							
							TIE/ ilegal/ Palsu	kedalu arsa	rusak				MS (MK penanda an dan MS uji lab) *	MK Penanda an dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penanda an dan TMS uji lab ****	TMS uji (Khusus Pangan Purposive)			
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Obat	sampel	Jakarta	128	Targeted	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	1	3	1
			-	-							0	0						0	0	0
			Jakarta	512	Random	60	0	0	0	4	87	39	35	0	4	0	0	4	48	39
			-	-							0	0						0	0	0
			-	-							0	0						0	0	0
			TOTAL	640		60	0	0	0	4	91	40	35	0	5	0	0	5	51	40
2	Obat Tradisional/	sampel	Jakarta	144	Targeted	23	0	0	0	10	48	6	6	0	0	0	0	0	42	6
			-	-							0	0						0	0	0
			Jakarta	336	Random	39	0	0	0	16	80	15	15	0	0	0	0	0	65	15
			-	-							0	0						0	0	0
			-	-							0	0						0	0	0
			TOTAL	480		62	0	0	0	26	128	21	21	0	0	0	0	0	107	21
3	Suplemen Kesehatan	sampel	Jakarta	48	Targeted	6	0	0	0	2	20	9	7	0	2	0	0	2	11	9
			-	-							0	0						0	0	0
			Jakarta	112	Random	19	0	0	0	8	49	13	13	0	0	0	0	0	36	13
			-	-							0	0						0	0	0
			-	-							0	0						0	0	0
			TOTAL	160		25	0	0	0	10	69	22	20	0	2	0	0	2	47	22
4	Kosmetik	sampel	Jakarta	288	Targeted	30	0	0	0	22	60	24	20	2	2	0	0	4	36	24
			-	-							0	0						0	0	0
			Jakarta	671	Random	68	0	0	0	44	141	54	34	0	20	0	0	20	87	54
			-	-							0	0						0	0	0
			-	-							0	0						0	0	0
			TOTAL	959		98	0	0	0	66	201	78	54	2	22	0	0	24	123	78
	Total Obat			128	Targeted	0	0	0	0	0	4	1	0	0	1	0	0	1	3	1
	Total Obat Tradisional			144		23	0	0	0	10	48	6	6	0	0	0	0	0	42	6
	Total Suplemen Kesehatan			48		6	0	0	0	2	20	9	7	0	2	0	0	2	11	9
	Total Kosmetik			288		30	0	0	0	22	60	24	20	2	2	0	0	4	36	24
	Jakarta			608	Targeted	59	0	0	0	34	132	40	33	2	5	0	0	7	92	40
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total targeted Obat, OT, Sk dan Kos			608		59	0	0	0	34	132	40	33	2	5	0	0	7	92	40
	Total Obat			512	Random	60	0	0	0	4	87	39	35	0	4	0	0	4	48	39
	Total Obat Tradisional			336		39	0	0	0	16	80	15	15	0	0	0	0	0	65	15
	Total Suplemen Kesehatan			112		19	0	0	0	8	49	13	13	0	0	0	0	0	36	13
	Total Kosmetik			671		68	0	0	0	44	141	54	34	0	20	0	0	20	87	54
	Jakarta			1631	Random	186	0	0	0	72	357	121	97	0	24	0	0	24	236	121
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos			1631		186	0	0	0	72	357	121	97	0	24	0	0	24	236	121
	TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos			2239		245	0	0	0	106	489	161	130	2	29	0	0	31	328	161
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																				
1	Pangan	sampel	Jakarta	160	Targeted	36	0	0	0	0	47	10	9	1	0	0	0	1	37	10
	0	0	-	-							0	0						0	0	0
	0	0	-	-	Random						0	0						0	0	0
	0	0	Jakarta	759		47	0	0	0	0	177	63	58	5	0	0	0	5	114	63
	0	0	-	-							0	0						0	0	0
	0	0	-	-							0	0						0	0	0
	Total Pangan			160	Targeted	36	0	0	0	0	47	10	9	1	0	0	0	1	37	10
	Total Pangan			759	Random	47	0	0	0	0	177	63	58	5	0	0	0	5	114	63
	TOTAL PANGAN			919		83	0	0	0	0	224	73	67	6	0	0	0	6	151	73
Sampel Makanan FORTIFIKASI																				
1	Pangan	sampel	0	120	Targeted	15	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0
	Jakarta	0	0	-							0	0						0	0	0
	-	0	0	-	Random						0	0						0	0	0
	Total targeted	0	0	0							0	0						0	0	0
	Total Obat	0	0	0							0	0						0	0	0
	Total Pangan			120	Targeted	15	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0
	Total Pangan			0	Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL PANGAN FORTIFIKASI			120		15	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0

Lampiran 3. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Iklan dan Label/Penandaan Triwulan I tahun 2021

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan												Total
			J a n u a r i	F e b r u a r i	M a r e t	A p r i l	M e i	J u n i	J u l i	A g u s t u s	S e p t e m b e r	O k t o b e r	N o v e m b e r	D e s e m b e r	
OBAT	Iklan	MK	22	15	18										55
		Jakarta	22	15	18										55
		-													0
		-													0
		TMK	3	39	13										254
		Jakarta	3	39	13										171
		-													0
		-													0
	Label	MK	19	34	52										440
		Jakarta	19	34	52										440

		-														0
		-														0
		TMK	1	6	8											8
		Jakarta	1	6	8											8
		-														0
		-														0
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	0	0	0											17
		Jakarta	0	0	0											17
		-														0
		-														0
		TMK	23	30	25											317
		Jakarta	23	30	25	3										317
		-														0
		-														0
	Label	MK	29	58	36											287
		Jakarta	29	58	36											287

		-														0
		-														0
		TMK	0	2	26											50
		Jakarta	0	2	26											50
		-														0
		-														0
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	0	0	0											26
		Jakarta	0	0	0											26
		-														0
		-														0
		TMK	10	20	15											103
		Jakarta	10	20	15											103
		-														0
		-														0
	Label	MK	19	25	16											103

		Jakarta	19	25	16											103
		-														0
		-														0
		TMK	0	0	10											8
		Jakarta	0	0	10											8
		-														0
		-														0
KOSMETIK	Iklan	MK	2	29 0	17 1											519
		Jakarta	2	29 0	17 1											519
		-														0
		-														0
		TMK	19	30	18											746
		Jakarta	19	30	18											746
		-														0
		-														0
	Label	MK	17	76	32											433
		Jakarta	17	76	32											433

		-														0
		-					2									0
		TMK	3	26	66											240
		Jakarta	3	26	66	3										240
		-														0
		-														0
PANGAN	Iklan	MK	0	20	6											361
		Jakarta	0	20	6											361
		-														0
		-														0
		TMK	50	60	44											607
		Jakarta	50	60	44											607
		-														0
		-														0
	Label	MK	80	98	93											709
		Jakarta	80	98	93											709
		-														0
		-														0

		TMK	2	3	0										32
		Jakarta	2	3	0										32
		-													0
		-													0
ROKOK	Iklan	MK	4	6	4										36
		Jakarta	4	6	4										36
		-													0
		-													0
		TMK	26	24	26										211
		Jakarta	26	24	26										211
		-													0
		-													0
	Label	MK	7	10	0	7									77
		Jakarta	7	10	0										77
		-													0
		-													0
		TMK	8	5	15										113
		Jakarta	8	5	15										113

		-														0
		-														0
TOTAL	Iklan	MK	28	13 3	19 9											1.150
		Jakarta	28	13 3	19 9											1.150
		-	0	0	0											0
		-	0	0	0											0
		TMK	13 1	17 3	14 1											2.058
		Jakarta	13 1	17 3	14 1											2.058
		-	0	0	0											0
		-	0	0	0											0
		Total iklan	15 9	50 4	34 0											3.208
	Label	MK	17 1	30 1	22 9											2.049
		Jakarta	17 1	30 1	22 9											2.049

		-	0	0	0											0
		-	0	0	0											0
		TMK	14	42	12 5											181
		Jakarta	54	59	75											181
		-	0	0	0											0
		-	0	0	0											0
		Total label	18 5	34 3	35 4											882

Lampiran 4. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Layanan Informasi Triwulan I tahun 2021

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah											Total
		J a n u a r i	F e b r u a r i	M a r e t									
1	Layanan informasi a)	207	221	245									673
													0
													0
2	Layanan pengaduan b)	2	3	3									8
													0
													0
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti c)	1	3	2									6
													0
													0
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat d)	0	2	2									4

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												Total
		J a n u a r i	F e b r u a r i	M a r e t										
														0
														0
5	KIE di Area <i>Car Free Day</i> (CFD), Pameran, Sosialisasi e)	0	0	1										1
														0
														0
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial f)	17	26	34										77
														0
														0
7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak g)	0	0	0										0
														0
														0
8	Sebagai Narasumber h)	0	2	3										5

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												Total
		J a n u a r i	F e b r u a r i	M a r e t										
														0
														0
	Total	227	257	290										774
		0	0	0										0
		0	0	0										0
		227	257	290										774



BBPOM DI JAKARTA



SIAP MENUJU WBBM